

**PERANAN BALAI PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN INFORMASI
WILAYAH VII TERHADAP AKUNTABILITAS
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**



BOSOWA

Oleh :

BUDI HIMAWAN SANGADJI

45 02 021 002

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Negara
Jurusan Ilmu Administrasi**

P a d a

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar yang tersebut namanya dibawah ini.

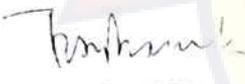
Nama : BUDI HEMAWAN SANSUDDI
No. Stambuk : 45 02 021 002
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program/Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PERAN BALAI PENYKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN
INFORMASI TERHADAP AETNABILITAS PEMERINTAH
KOTAMAKASSAR

Telah melaksanakan ujian filripsi setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. HUSAIN HAMKA, M.Si


Drs. SYAMSUL BAHRI, M.Si

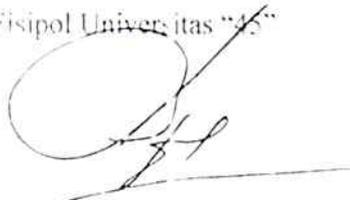
Mengetahui

Dekan Fisipol Universitas "45"

Ketua Jurusan Administrasi Negara

Fisipol Universitas "45"


Dra. ASMIRAH, M.Si


Drs. H. Misbahuddin Ahmad, M. S

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini Sabtu, Tanggal Tujuh Belas Bulan Mei Tahun 2008, Skripsi dengan :

Judul : **Peranan Balai Pengkajian dan pengembangan Informasi Wilayah VII Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Kota Makassar.**

Nama : **Budi Himawan Sangadji**
No. Stb/Nirm : 45 02 021 002
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Telah diterima oleh panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana (S1).

PENGAWAS UMUM


Prof. DR. H. Abu Hamid
Rektor Universitas "45" Makassar


Dra. Asmirah, M.Si
Dekan Fisipol "45" Makassar

PANITIA


Arief Wicaksono, S.Ip
Wakil Dekan I Fisipol


Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

TIM PENGUJI

Drs. H. Husain Hamka, MS.


(.....)

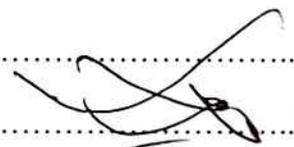
Drs. Syamsul Bachri, M.Si


(.....)

Drs. M. Rusdi Maidin, SH, M.Si

(.....)

Drs. Syamsuddin Maldum, M.Pd


(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. Atas limpahan berkah dan karunianyalah sehingga penulis dapat melalui proses pendidikan formal baik pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi, yang hal ini diperantarakan melalui kedua orang tua penulis yang tak pernah jenuh berusaha dan berupaya bekerja demi memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

Penulis sadar akan segala kekurangan yang terdapat didalam isi karya ilmiah ini, baik secara referensi, metodologi, data, informasi maupun analisis. Untuk itu, masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai langkah awal pembenahan dan penajaman karya ilmiah ini yang akan nantinya dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa FISIPOL "45" Makassar nantinya.

Selesainya proses perkuliahan di Universitas "45" Makassar dan karya ilmiah ini, sungguh banyak melibatkan berbagai pihak, yang selama ini memberikan motivasi dan kontribusi terhadap penulis. Sehingga melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Bapak Rektor Universitas "45" Makassar, Prof. Dr. H. Abu Hamid dan seluruh pembantu rektor, beserta seluruh jajarannya.
- Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar, Dra. Asmirah dan seluruh pembantu dekannya.
- Bapak Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar, Bapak MIsbahuddin Achmad MS

- Bapak Drs. H. Husain Hamka M.Si dan Bapak Drs. Syamsul Bahri M.Si. Masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
- Seluruh Staf Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNiversitas “45” Makassar yang telah banyak mentranfer ilmunya dan telah banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam setiap proses perkuliahan.
- Kepada kedua orang tua yang tercinta dan tersayang, ayahanda Izhak Sangadji dan Ibunda Aizah, yang rela bersusah-payah bekerja demi perjuangan anak-anaknya di bangku pendidikan.
- Khusus buat kakak ku, yang selama ini memberikan dorongan kepada penulis untuk lebih tegar dan tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- Buat Bapak Drs. Baharuddin Dolla selaku Kepala BPPI Wilayah VII Makassar beserta jajarannya yang dengan kesabarannya memberikan kesempatan dan ruang untuk penulis melakukan penelitian, baik dalam pemberian data, informasi maupun masukan kepada penulis.
- Buat kakanda yang terhormat Abdurrahman Kader, S.Sos yang telah banyak memberikan kontribusi besar di dalam penyusunan karya ilmiah ini.
- Kepada kawan-kawan seperjuangan...

DAFTAR ISI

Halaman

LAMAN JUDUL	i
LAMAN PERSETUJUAN	ii
FTAR ISI	iii
FTAR TABEL	iv
B I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metodologi Penelitian	10
B II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Informasi dan Komunikasi	16
B. Pengertian Peranan	28
C. Pengertian Pemerintahan	29
D. Pengertian Akuntabilitas	31
E. Tujuan dan Fungsi Lembaga BPPI Wilayah VII Makassar	33
B III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
A. Sejarah Berdirinya BPPI Wilayah VII Makassar	37
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	38
C. Keadaan Pegawai	41
B IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Metodologi BPPI Wilayah VII Makassar Dalam Menjalankan Program Pengkajian dan Pengembangan Informasi	48

B. Keberhasilan BPPI Wilayah VII Dalam Menjalankan Program Terkait Pertanggung Jawaban Pemerintah Kota Makassar	60
C. Faktor Pendukung dan Penghambat	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Halaman

abel 1	Teknik Penarikan Sampel	12
abel 2	Keadaan Pegawai BPPI Wilayah VII Makassar Menurut Pangkat atau Golongan	42
abel 3	Keadaan Pegawai BPPI Wilayah VII Makassar Menurut Tingkat Pendidikan	45
abel 4	Keadaan Pegawai BPPI Wilayah VII Makassar Berdasarkan Jenis Kelamin	46
abel 5	Tanggapan Responden Tentang Metodologi Pengkajian dan Pengembangan Informasi BPPI Wilayah VII Makassar	58
abel 6	Tanggapan Responden Tentang Pemanfaatan Hasil Pengkajian BPPI Wilayah VII Untuk Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Kota Makassar.	59
abel 7	Tanggapan Responden Tentang Kekuatan Hukum Keberadaan BPPI Wilayah VII Makassar Berdasarkan SK No. 84/Kep/M. KOMINFO/10/2005	63
abel 8	Tanggapan Responden Tentang Respon Pemerintah Kota Makassar yang Menyangkut Dengan Keberadaan BPPI Wilayah VII Makassar	65
abel 9	Tanggapan Responden Tentang Keleluasan BPPI Wilayah VII Makassar Dalam Melakukan Pengkajian Kembali LPJ Pemerintah Kota Makassar	66
abel 10	Tanggapan Responden Tentang Efektifitas Pelaksanaan Fungsi BPPI Wilayah VII Makassar	68
abel 11	Tanggapan Responden Tentang Demokratisasi dan Transparansi Pemerintah Kota Makassar Dalam Proses Penyusunan LPJ Pemerintah Kota Makassar	70
abel 12	Tanggapan Responden Tentang Keterlibatan BPPI Wilayah VII Dalam Penyusunan Perencanaan Program Kerja Pemerintah Kota Makassar	72

bel 13	Tanggapan Responden Tentang Keterlibatan BPPI Wilayah VII Makassar Dalam Proses Evaluasi Program Kerja Pemerintah Kota Makassar	74
bel 14	Tanggapan Responden Tentang Keterlibatan BPPI Wilayah VII Makassar Secara Institusional Dalam Hal Pertanggung Jawaban Pemerintah Kota Makassar.....	76
bel 15	Tanggapan Responden Tentang Hubungan BPPI Wilayah VII Makassar Dengan Instansi INFOKOM Kota Makassar	78
bel 16	Tanggapan Responden Tentang Tingkat Partisipasi BPPI Wilayah VII Makassar Dalam Proses Pembangunan Kota Makassar	80
bel 17	Tanggapan Responden Tentang Tingkat Keberhasilan BPPI Wilayah VII Makassar Dalam Melaksanakan Fungsinya	82
bel 18	Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Hal Pembangunan Kota Makassar	84
bel 19	Tanggapan Responden Tentang Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Kota Makassar Dalam Menyusun dan Melaporkan Hasil Kinerjanya	86
bel 20	Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pengawasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Makassar	87
bel 21	Tanggapan Responden Tentang Keseimbangan Antara SDM Yang Dimiliki BPPI Wilayah VII Makassar Dengan Luas Wilayah Kerjanya.	93
bel 22	Wilayah Kerja BPPI Wilayah VII Makassar, Berdasarkan SK No. 84/KEP/M. KOMINFO/10/2005.	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang baik dan bersih adalah pemerintah yang tahu akan kebutuhan rakyatnya, pemerintah yang secara transparansi (terbuka) mempertanggung jawabkan kinerja pemerintahan kepada rakyat, pemerintah yang secara sadar mengakui kedaulatan rakyat sebagai wujud terlaksananya demokratisasi Bangsa Indonesia.

Rujukan terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih adalah terselenggaranya nilai-nilai demokrasi pada tingkat pusat maupun lokal. Tarik ulur kewenangan dalam sejarah politik Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai muatan konflik yang begitu besar dikarenakan pemusatan titik kekuasaan, yang di dalam praktek ketatanegaraan selama ini pemerintah pusat sebagai sentral kebijakan melakukan tindak kesewenangan dalam pengambilan keputusan yang tanpa di pikirkan-dampaknya ketika keputusan itu di laksanakan. Pemerintah pusat dengan kewenangannya, sepihak memutuskan apa yang harus di lakukan oleh pemerintah daerah. Sentralisasi kekuasaan yang terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia telah melahirkan reaksi keras penentangan daerah-daerah yang selama ini dirasakan adanya ketidak adilan, ketidak jelasan, dan ketidak pastian peranan dalam fungsi-fungsi pemerintahan.

Desentralisasi sebagai landasan proses perombakan sistem pemerintahan yang sentralistik, memfungsikan apa yang menjadi kewenangan daerah sebagai bentuk pelaksanaan (implementasi) dari Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang pengaturan keuangan daerah sesuai dengan amanah UUD 1945 ; pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Ini semua di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya perubahan undang-undang otonomi daerah yang di mana lebih dititik beratkan pada peningkatan pelayanan secara efektif dan efisien, adanya kepastian hukum terhadap kinerja pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan baik secara kepemimpinan maupun secara institusional, transparansi; keterbukaan pemerintah dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat.. Karena otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi.

Dalam konteks (ruang lingkup masalah) kedemokratisasian, pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan amanah UUD 1945, diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menegaskan sikap amanah kekuasaan dari rakyat yang nantinya terimplementasi melalui pelayanan, pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pengabdian pemerintah terhadap rakyat yang menyangkut pelaksanaan demokrasi sebagai wujud pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam hal ini tentunya Lembaga Informasi mempunyai peranan penting dalam menyeimbangkan, dan mampu mempengaruhi kebijakan pusat yang berkaitan dengan eksistensi pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan negara. untuk itu, Balai Pengkajian Dan Pengembangan Informasi (BPPI) sebagai organisasi pemerintah yang mengutamakan terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaran komunikasi

dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terumuskan dalam visi dan misinya. Dalam hal ini BPPI berdasarkan fungsinya adalah melakukan pengkajian dan pengembangan informasi, diharapkan mampu memediasi masyarakat di dalam ruang-ruang publik yang di dalamnya terlaksana pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat secara langsung. Terlaksananya fungsi-fungsi BPPI sebagai wadah komunikasi yang mampu menyatukan prinsip-prinsip pemerintahan pusat maupun daerah yang di dasarkan atas nilai-nilai kemasyarakatan (Demokrasi), tentunya pemerintah dengan kompleksitas atau dengan kerumitan kewenangannya, mampu membawa masyarakat dan pemerintah pada tujuan yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa peran BPPI dalam membantu pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah sebagai bentuk terlaksananya nilai-nilai demokrasi pada tingkat lokal, dengan maksud memediasi pemerintah dan masyarakat dalam sebuah pertemuan ilmiah. Keterlibatan masyarakat secara personal maupun masyarakat yang tergabung dalam sebuah kelompok sosial (LSM) ini, yang menjadi motifasi penulis untuk memilih judul ; **PERANAN BALAI PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN INFORMASI WILAYAH VII TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**, sebagai judul karya ilmiah penulis.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Peran aktif BPPI dalam memediasi masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah di setiap proses pertanggung jawaban kinerja pemerintah berdasarkan legitimasi hukum yang termuat di dalam undang – undang otonomi daerah No. 32 Tahun 2004 tentang hak dan kewajiban pelaksanaan otonomi daerah ; pasal 25 dan pasal 26 tentang tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah ; poin(f) menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, (d) melaksanakan kehidupan demokrasi, (h) melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik (Marbun, 2005: 117-118).

Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi merupakan subjek penelitian yang memiliki beberapa sub-bagian kerja. Ini semua dilandasi dengan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 84/KEP/M. KOMINFO/10/2005, tentang organisasi dan tata kerja BPPI sebagai proses nomenklatur (tata nama). Selain itu, BPPI Wilayah VII Makassar di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit pelaksana teknis di daerah yakni ; kegiatan operasional, yaitu melakukan pengkajian dan pengembangan informasi di daerah serta evaluasi pelaksanaannya, baik itu pengkajian dan pengembangan informasi melalui penelitian lapangan maupun kajian melalui media (BPPI, Program Kerja tahun 2008:1).

Berdasarkan fungsi BPPI, penulis ingin memperjelas ruang lingkup atau batasan penelitian demi memudahkan dan menjaga keakuratan data yang diperoleh nantinya. Mengingat secara fungsional BPPI memiliki beberapa fungsi yang bisa dijadikan ruang masalah untuk diteliti, maka dalam hal ini, kegiatan operasional, dalam bentuk pengkajian dan pengembangan informasi baik melalui seminar maupun penerbitan jurnal

yang didalamnya terdapat keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, individu maupun kelompok yang tergabung dalam sebuah organ masyarakat (LSM), menyangkut dengan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Makassar. sederhananya, penulis ingin mengetahui seberapa besar keterlibatan peran BPPI didalam pembangunan daerah Kota Makassar melalui sudut pandang akuntabilitas pemerintah kota. Ini yang menjadi sorotan penulis untuk mengetahuinya. Untuk itu ada beberapa masalah yang telah penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana metodologi BPPI dalam menjalankan program pengkajian dan pengembangan tentang pertanggung jawaban pemerintah Kota Makassar.
2. sejauh mana keberhasilan BPPI menjalankan program pengkajian dan pengembangan terkait dengan pertanggung jawaban Pemerintah Kota Makassar.
3. Faktor Pendukung dan penghambat apa sajakah yang mempengaruhi kegiatan pengkajian dan pengembangan BPPI.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui metodologi BPPI dalam menjalankan program pengkajian dan pengembangan informasi tentang pertanggung jawaban pemerintah kota makassar.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan BPPI dalam menjalankan program kerjanya.

- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kegiatan BPPI secara internal maupun eksternal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam kajian pemerintahan
2. sebagai bahan rujukan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peranan media dan masalah pemerintahan atau penelitian lain yang relevan dengan judul penelitian ini.

b. Kegunaan Pragtis.

Yaitu sebagai bahan masukan balai pengkajian dan pengembangan informasi wilayah VII makassar dalam meningkatkan mutu kerja dan meningkatkan layanan informasi masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi salah satunya di selarasi dengan terbukanya kran-kran kebebasan media dalam mengakses pos-pos informasi yang tentunya di peruntukan kepada rakyat. Kebebasan merupakan prasyarat dari proses berjalanya nilai-nilai demokrasi yang secara lokal di butuhkan penyesuaian dan penyeimbangan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah dengan rakyatnya, dan juga kesadaran pemerintah terhadap hak rakyat sebagai abdi rakyat atas

kedaulatan rakyatnya. Hal ini diharapkan bukan sekedar pengakuan bersama antara masyarakat dan pemerintah namun lebih dari itu keduanya mampu mengeksplorasi hak-hak atau kebutuhan dalam memanfaatkan pentingnya informasi dalam keseharian aktifitas dan atau tugas dari keduanya. Sebagai perwujudan masyarakat atau pemerintah yang berbudaya informasi.

Informasi mempunyai kekuatan dalam menumbuh kembangkan keharmonisan pemerintah dan masyarakat sebagai mitra kerja di dalam pembangunan bangsa. Namun sebaliknya informasi pun mempunyai dampak negatif. Untuk itu, dibutuhkan penanganan informasi yang efektif oleh mass media atau organisasi-organisasi informasi lainnya yang kredibilitas (dapat di percaya) sehingga nantinya mampu memposisikan pemerintah dan masyarakat sejajar di dalam pokok-pokok permasalahan (bersikap netral, tegas), yang tak ada superior dan inferior suatu kelompok dalam penguasaan secara penuh terhadap kelompok minoritas.

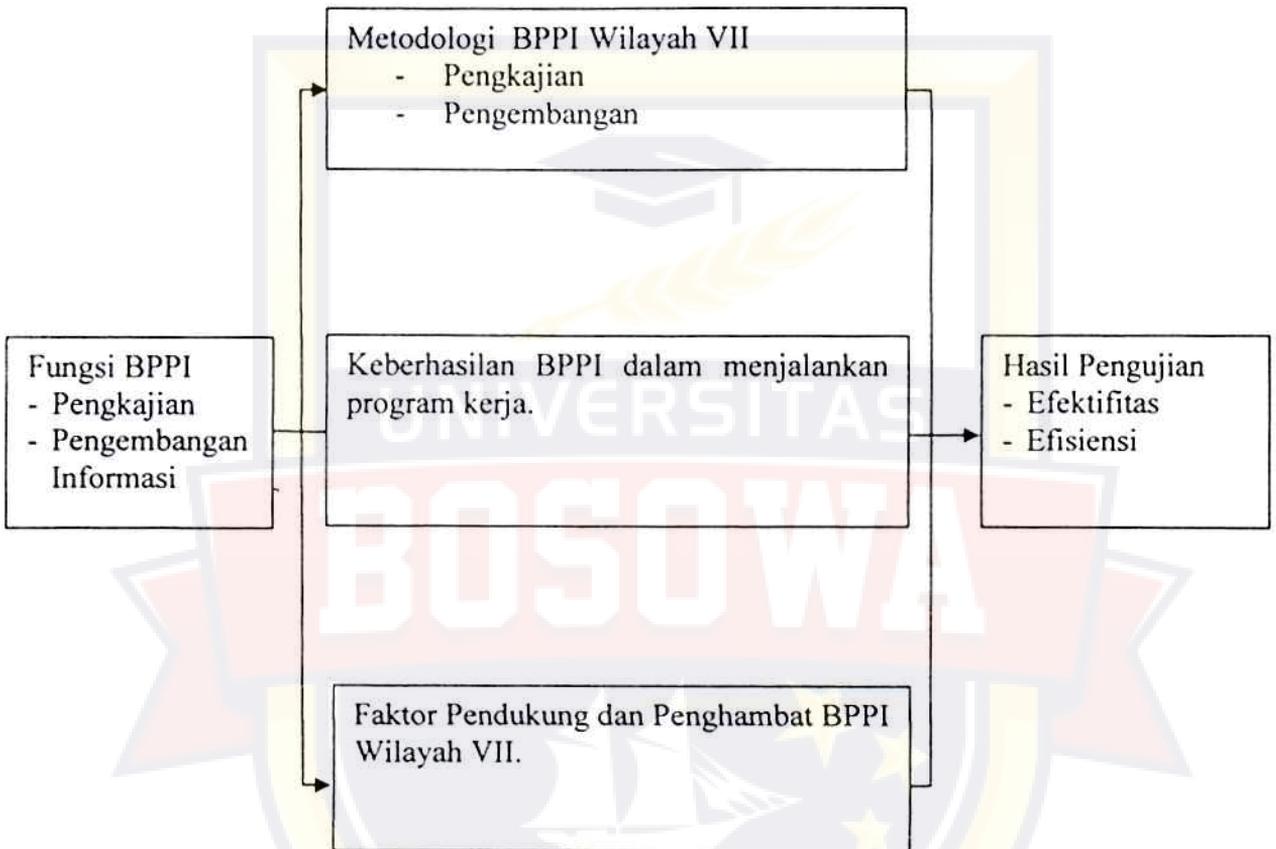
Dalam hal ini, BPPI sebagai perangkat penunjang pemerintah didalam pelayanan masyarakat di bidang informasi, tentunya bersikap adil didalam pelaksanaan fungsi pokok yang tentunya untuk menumbuhkan dan menjaga berjalanya keharmonisan masyarakat dan pemerintah. Dengan fungsinya menyediakan informasi terhadap khalayak (konsumtif informasi), dapat juga memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan temuan-temuan kasus di dalam internal pemerintah yang nantinya menjadi tolok ukur didalam perubahan atau pembenahan proses pelaksanaan tugas. Dalam hal ini peningkatan kualitas kinerja pemerintah itu sendiri. (The Oxford Advance Learners Dictionary dalam Widodo, 2001:148).

Optimalisasi pelaksanaan fungsi pengembangan informasi, dimana masyarakat sebagai objek konsumtif informasi nantinya, harus turut terlibat di dalam pelaksanaan-pelaksanaan program kerja BPPI dalam hal ini, dengan pertanggung jawaban pemerintah, masyarakat dapat berpartisipasi tanpa termobilisasi dengan menyampaikan aspirasi-aspirasinya melalui forum-forum yang di mediasi oleh BPPI Wilayah VII Makassar yang nantinya terbudaya di dalam tatanan masyarakat dan secara dinamis mampu menumbuhkan nilai-nilai demokrasi nasional yang di cita-citakan.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konseptual penelitian dapat di lihat dari kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual



E. Metodologi Penelitian

1. Tipe dan Dasar Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Deskriptif adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang digunakan dengan cara menggambarkan subjek dan objek penelitian pada saat penelitian dilakukan berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian deskriptif biasanya menggunakan variabel tunggal, dalam arti bahwa dalam penelitian tersebut tidak ada variabel lain sebagai variabel penghubung atau variabel pembanding.

b. Dasar Penelitian.

Survey adalah proses penelitian yang dilakukan untuk mengamati secara langsung dan mendalam terhadap setiap proses secara menyeluruh terhadap objek penelitian. Dalam arti bahwa dengan dasar survey ini peneliti berusaha melihat secara langsung setiap proses yang terjadi dan dilakukan oleh subjek penelitian yang diamati secara langsung oleh peneliti, serta setiap masalah yang dihadapi oleh subjek penelitian diupayakan mencari pemecahan masalahnya.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh komponen sumber daya manusia yang terdapat dalam Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi yang berjumlah 27 orang. Dan jumlah tersebut berdasarkan data anggota dan pegawai BPPI Wilayah VII Makassar pada tahun

2008. dari jumlah anggota dan pegawai tersebut terdiri atas 4 orang Kepala, 7 orang Staf Administrasi dan 16 orang Badan Pekerja. Selain seluruh sumber daya manusia BPPI Wilayah VII, populasi dan sumber data, penulis jadikan Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar sebagai bahan pengimbang dalam penelitian ini.

b. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian jumlah anggota dan pegawai BPPI Wilayah VII yang diambil oleh peneliti dengan metode tertentu sebanyak 17 orang, dan kemudian dijadikan sumber data dan informasi dalam penelitian yang dilakukan nanti. Dan jumlah tersebut di atas merupakan representasi dari jumlah anggota BPPI Wilayah VII.

Dalam setiap penelitian, sesuatu yang tidak mungkin bagi peneliti untuk mempelajari seluruh populasi, terutama populasi yang secara kuantitas jumlahnya cukup banyak dan secara jenis, populasi memiliki tingkat heterogenitas yang sangat banyak. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel.

Teknik pengambilan sampel merupakan sebuah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan jumlah atau besarnya sampel yang diambil dan kemudian digunakan dalam penelitiannya. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Proportionate Stratified Random Sampling". Teknik proportionate stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara proporsional dan berdasarkan tingkat jenis populasi yang dilakukan secara acak.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 27 orang. Dengan jumlah populasi tersebut maka sampel yang diambil oleh peneliti sebanyak 17 orang. Karena populasi dalam penelitian ini bersifat strata, berdasarkan tingkat jabatan maka sampel pun bersifat

strata sesuai dengan populas. Tingkat jabatan dan jumlah populasi dalam penelitian ini sebagai berikut, 4 orang Kepala, 7 orang Staf Administrasi dan 16 orang Badan Pekerja.

Dengan demikian teknik penarikan sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1
Tabel Teknik Penarikan Sampel

Jabatan Populasi	Perhitungan	Persentase	Sampel
Pimpinan	$\frac{4}{27} \times 17$	2,52	3
Staf Administrasi	$\frac{7}{27} \times 17$	4,41	4
Badan Pekerja	$\frac{16}{27} \times 17$	10,07	10
Jumlah			17

2. Teknik Pengumpulan Data.

a. Data dan Jenis Data.

Data adalah kumpulan informasi baik berupa tulisan angka-angka dan gambar yang didapatkan melalui proses tertentu sesuai dengan kondisi realitas dilapangan.

1. Data sekunder adalah data yang berbentuk laporan hasil-hasil penelitian dan berbentuk buku-buku atau sumber bacaan lainnya. Data sekunder ini diperoleh oleh peneliti berasal dari lokasi penelitian dan melalui studi kepustakaan.

2. Data primer adalah data yang berbentuk penilaian pendapat dari sampel penelitian, dan informan yang diperoleh oleh penulis dengan cara wawancara langsung dan penyebaran angket.

b. Teknik Pengumpulan Data.

1. Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek dan subjek penelitian.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap sampel sebagai sumber data dan informan sebagai data pembanding.
3. Angket adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti, yang dianggap berkaitan dengan masalah yang akan diteliti..

4. Pengelolaan dan Analisa Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif, maka dalam pengelolaan dan analisis data ini penulis menggunakan metode sebagai berikut. Pertama, Penulis mengumpulkan seluruh data yang dianggap perlu dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian mengidentifikasi data sesuai jenis-jenis masalah yang akan di bahas.

Kedua, data yang telah diidentifikasi dan diklasifikasikan, dianalisis dengan pendekatan statistik deskriptif. Yaitu peneliti akan menggambarkan hasilk penelitian dengan cara penyajian data dalam bentuk tabel-tabel dan perhitungan presentase.

Ketiga, melalui analisis data yang akurat dengan pendekatan statistik deskriptif, penulis akan membuat kesimpulan secara jeneral yang kemudian menjadi hasil dari penelitian nanti.

F. Sistematika Pembahasan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan sistematis dari penulisan ini maka disusun dalam lima bab yaitu :

Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

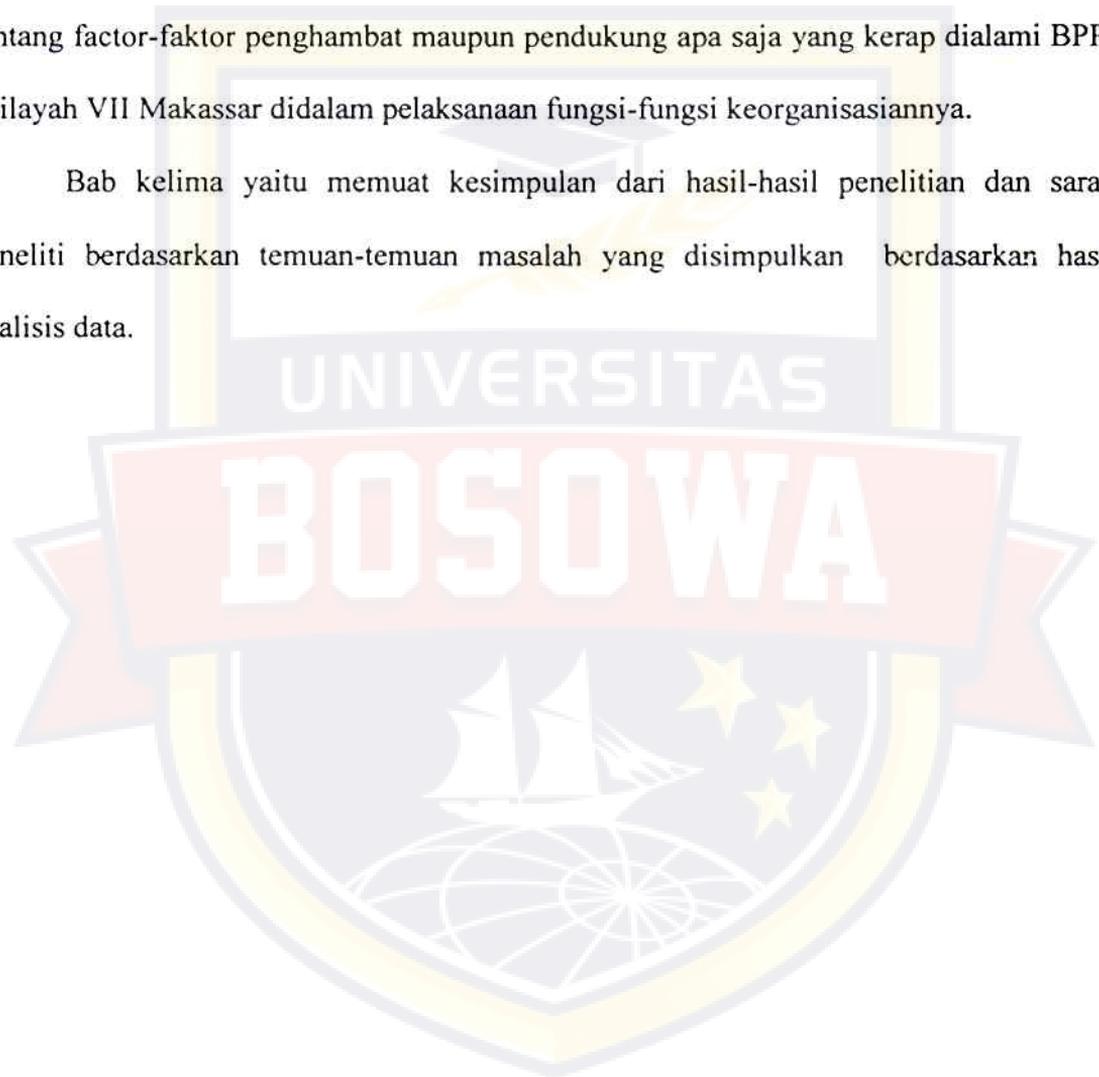
Bab dua yaitu tinjauan pustaka, yang menguraikan beberapa pengertian dalam hal ini adalah pengertian informasi dan komunikasi, pengertian peranan, pengertian pemerintahan, pengertian akuntabilitas, dan tujuan pembentukan Departemen Komunikasi dan Informatika BPPI Wilayah VII Makassar.

Bab ketiga yaitu gambaran umum lokasi penelitian yang memuat sejarah singkat berdirinya balai pengkajian dan pengembangan informasi, struktur organisasi dan tata kerja, juga keadaan pegawai Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah VII Makassar.

Bab keempat yaitu memuat gambaran hasil analisis data penelitian yang terbagi dalam tiga bagian berdasarkan kebutuhan penelitian yang telah tergambar pada rumusan masalah. Bagian pertama dijabarkan tentang gambaran metodologi BPPI Wilayah VII Makassar dalam melakukan pengkajian dan pengembangan informasi. Bagian kedua

menjabarkan tentang sejauh mana keberhasilan BPPI Wilayah VII Makassar menjalankan program kerjanya yang terkait dengan pertanggung jawaban Pemerintah Kota Makassar. Dan yang ketiga adalah bagian yang didalamnya menggambarkan tentang factor-faktor penghambat maupun pendukung apa saja yang kerap dialami BPPI Wilayah VII Makassar didalam pelaksanaan fungsi-fungsi keorganisasiannya.

Bab kelima yaitu memuat kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan saran peneliti berdasarkan temuan-temuan masalah yang disimpulkan berdasarkan hasil analisis data.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Informasi dan Komunikasi

Dalam sebuah organisasi, informasi merupakan prasyarat mutlak dalam membantu pengembangan sistem keorganisasian yang mana menyangkut dengan pengambilan keputusan, implementasi program kerja maupun evaluasi. Pentingnya informasi dalam sebuah organisasi, tidak terlepas pisahkan dengan pentingnya komunikasi di dalam sebuah organisasi itu sendiri dalam hal ini data yang telah terolah membentuk informasi yang nantinya di komunikasikan kepada bawahan baik dalam bentuk perintah melaksanakan sesuatu, dan tidak di perbolehkan melaksanakan sesuatu maupun sebagai informasi awal dalam merumuskan kebijakan. Untuk itu informasi dan komunikasi merupakan prasyarat mutlak dalam peningkatan kualitas kebijakan. Menyangkut dengan informasi Davis (1999) mendefinisikan "*informasi adalah data yang telah di olah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang*". Dan juga menurut Mc Fadden, dkk (1999) mendefinisikan bahwa: "*informasi sebagai data yang telah di proses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut*".

Shanon dan Weaver, adalah dua orang insinyur listrik yang menggunakan pendekatan matematis untuk mendefinisikan informasi dalam (kronke,1992) menurut keduanya informasi adalah "*jumlah ketidak pastian yang di kurangi sebuah pesan*

diterima". Artinya, dengan adanya informasi awal (data yang telah di proses) maka seorang pemimpin misalnya dapat mengurangi keragu-raguan atau ketidak pastian dalam mengambil keputusan yang tentunya hal ini sangat berpengaruh pada roda organisasi yang di pimpinnya.

Sederhananya, informasi terbentuk melalui penyatuan atau pengelompokan data-data secara teratur (simbol-simbol dari tindakan, benda, dan sebagainya) membentuk suatu makna (Davis, 1999 : 29). Jadi yang terpenting dalam membedakan sebuah informasi dan data informasi adalah "siratan makna" dalam hal ini informasi telah mempunyai pembentukan makna yang nantinya dapat mengarahkan seseorang dalam memahami isi informasi tersebut. Sementara data belum memiliki atau belum terjadi pembentukan makna yang dapat mengarahkan pengguna seperti keberadaan makna sebuah informasi. Untuk itu berdasarkan pentingnya sebuah makna informasi, lebih jauh ketiga teori tersebut telah menjabarkan dalam hal ini, informasi baik sebagai pengetahuan awal maupun sebagai pelengkap pengetahuan sebelumnya, yang menyangkut dengan pengambilan keputusan, dapat lebih meningkatkan kualitas keputusan itu sendiri.

Informasi sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut, (Davis, 1999) :

- a. *Benar atau salah, maksudnya informasi berhubungan dengan realitas atau tidak, jika penerima informasi yang salah mempercayainya, efeknya seperti kalau, informasi itu benar.*
- b. *Baru, maksudnya informasi tersebut benar-benar baru bagi si penerima.*
- c. *Tambahan, maksudnya informasi dapat memperbaharui atau memberikan perubahan terhadap yang telah ada.*
- d. *Korektif, maksudnya informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi yang sebelumnya di anggap salah atau kurang benar.*

- e. *Penegas, maksudnya informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat.*

Data adalah sebuah bentuk yang masih mentah dan belum dapat menerangkan lebih banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut, menjadi sebuah informasi, penerima pesan kemudian menerima informasi tersebut dan membuat suatu keputusan atau tindakan yang lain informasi juga sangat ditentukan pada kualitas informasinya (Qualiti of Information), dan tergantung dari tiga hal, yaitu:

- a. Informasi harus akurat, artinya bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak mengacaukan.
- b. Informasi harus tepat pada waktunya, artinya informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat, karna jika terlambat maka berakibat fatal bagi sebuah organisasi.
- c. Informasi haarus relevan, artinya informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya, karena setiap orang relevansi informasinya berbeda.
- d.

Syarat-syarat tentang informasi yang baik agar tidak menimbulkan masalah saat menkomunikasikan, antara lain :

- a. Ketersediaan.

Ada syarat mendasar bagi sebuah informasi adalah ketersediaannya. Informasi harus dapat diperoleh bagi orang yang hendak memanfaatkannya.

b. Mudah Dipahami.

Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat keputusan baik menyangkut pekerjaan rutin maupun keputusan-keputusan yang bersifat strategis.

c. Relevan.

Informasi dalam konteks organisasi adalah informasi yang benar-benar mempunyai hubungan dengan permasalahan, misi dan tujuan organisasi.

d. Bermanfaat.

Sebagai konsekuensi dari syarat relevansi, informasi harus juga bermanfaat bagi organisasi.

Secara sadar komunikasi telah menjadi kebutuhan pemerintah dan masyarakat sejak awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipertegas melalui rumusan UUD 1945 dimana kedaulatan rakyat yang menjadi rujukan hak asasi manusia warga negara Indonesia. Kedaulatan merupakan landasan nilai demokrasi dan menjadi tolak ukur pembangunan dalam berbagai dimensi, inipun telah terjabarkan melalui pasal-pasal dalam UUD 1945 GBHN maupun di beberapa ketetapan MPR RI Nomor II / MPR / 1998 dan ketetapan MPR RI Nomor IV / MPR / 1999 tentang GBHN (Soehoet, 2003 : 47-53). Yang semuanya telah tersurat antara lain didalam pokok-pokok pikiran undang-undang dasar yaitu “negara “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, “Negara” hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Lebih jauh seperti apa yang telah diuraikan bahwa pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, telah disederhanakan melalui pasal-pasal antara lain,

pasal 1 ayat 2 : kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, pasal 27 ayat 2 : tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 28 : kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagai mana ditetapkan undang-undang, pasal 30 : tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam pembelaan negara.

Dari beberapa penjabaran diatas, kita dapat menelusuri seberapa penting sebuah komunikasi pada lingkungan pemerintah dan masyarakat dimana keduanya sebagai subyek pengambilan keputusan maupun menjadi objek kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Harmonisasi dari keduanya dapat terpelihara ketika keterbukaan, kejujuran dapat dimunculkan melalui komunikasi yang efektif dari keduanya. Aktifitas komunikasi menjadi fatal adanya ketika komunikasi itu terbangun dari hasil mobilisasi masyarakat oleh orang-orang atau individu yang notabenen mempunyai kepentingan pribadi. Sehingga konsekuensi logis dari pemerintah sebagai badan pelaksana dari aspirasi dapat memutuskan apa yang seharusnya dilakukan sebagai reaksi positif dari tuntutan masyarakat tidak seperti apa yang di harapkan oleh masyarakat yang merasa dirugikan atau diabaikan.

Pentingnya komunikasi didalam membangun bangsa indonesia dapat dilihat melalui pendapat GDE "komunikasi berasal dari bahasa latin yakni" *Communication*" bersumber dari perkataan "Communis" yang berarti "sama" menurut GDE dalam Erliana. 2005 ". Sederhananya komunikasi adalah proses penyampaian ide-ide atau perasaan seseorang kepada orang lain yang diaplikasikan secara benar dengan etika yang tepat.

Lebih jauh menurut KINCAID (1977 : 7 dalam Erliana 2005 : 17) bahwa

“Komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi”. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Siporin bahwa *“Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dan dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi atau mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan diantara orang-orang yang berinteraksi”*.

Berlo dalam bukunya *Communication Process* mengemukakan komunikasi sebagai *“Suasana yang penuh keberhasilan jika dan hanya jika penerima pesan memiliki makna terhadap pesan tersebut dimana makna yang di perolehnya tersebut sama dengan apa yang di maksudkan oleh sumber (Berlo, 1960 : 188)”*. Sedangkan Meyers dan Meyer (1982 : xv) dalam Erliana mengemukakan pendapatnya tentang komunikasi bahwa *“Komunikasi sebagai titik pusat kekuatan menyatukan sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan karenanya mereka akan bergerak pada satu tindakan yang terorganisir ”*.

Berdasarkan pernyataan dan definisi tersebut diatas dapat dikemukakan kesimpulan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian, menerima dan menanggapi pesan-pesan antara dua orang atau lebih yang mempunyai persamaan makna (pengetahuan) terhadap keputusan tersebut umumnya dalam berkomunikasi tidak selamanya orang-orang mempunyai kesamaan dalam menentukan makna, namun pada intinya sebuah pengetahuan tentang isi pesan yang disampaikan atau yang diterima

dimiliki oleh keduanya sehingga penafsiran setidaknya mempunyai hubungan terhadap isi pesan tersebut.

Makna hakekat komunikasi ditinjau dari kajian psikologi dapat ditemui pada karakteristik seseorang, sehingga makna filter konseptual yang di internalisasikan merupakan hasil pengalaman perorangan pada masa silam, pola peneguhan yang telah dialami oleh individu Upton (1961) secara jelas mengemukakan "*komunikasi terjadi selama makna ujaran berhubungan dengan makna yang ditafsirkan, karena keduanya adalah respon yang terkondisikan*". Keberhasilan komunikasi tergantung pada sejauh mana tingkat kesamaan pengalaman komunikasi yang lalu.

Berlo (1960 : 184) dalam tulisannya mengemukakan bahwa, "*.....orang hanya dapat memperoleh makna yang sama, selama mereka memiliki pengalaman yang sama atau dapat mengantisipasi pengalaman yang sama*".

Dalam berkomunikasi tentunya ada penyampaian isi pikiran atau perasaan oleh seseorang yang dalam istilah komunikasi disebut "Komunikator" dan isi pikiran atau perasaan dinyatakan sebagai "pesan" sedangkan yang menerima pesan disebut "Komunikan". seperti apa yang telah dijelaskan bahwa bila komunikasi terbangun diantara komunikator dan komunikan tanpa ada kesamaan penafsiran makna yang diperkuat melalui pengalaman sebelumnya maka aktifitas komunikasi yang berlangsung tidak efektif atau dengan kata lain tidak komunikatif adanya. Karena komunikasi efektif adalah komunikator dan komunikan yang aktif dalam menyampaikan dan menanggapi pesan yang disampaikan berdasarkan pengalaman sebelumnya yang teraplikasi secara benar dengan etika yang cepat dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Hoflan (1973) "*.....Communication is the process by which an individual transmits stimuli usually verbal symbols to modify the behaviour of other individuals...*" artinya komunikasi adalah sebuah proses yang mana seseorang seperti biasanya menyampaikan maksud secara lisan simbol untuk merubah kebiasaan atau perilaku seseorang.

U.Efendi (1984 : 21) yang memberikan pengertian komunikasi sebagai "*proses dimana seorang insan (komunikator) menyampaikan perangsang (biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-kata) untuk mengubah tingkah laku insan lainnya*".

Diberbagai organisasi pemerintahan yang mempunyai kejelasan hierarki atau wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh bawahan, tentunya sangat membutuhkan komunikasi. Karena komunikasi bertujuan untuk mengendalikan perilaku anggota. Komunikasi dengan fungsinya mencapai pengertian satu sama lain, membina kepercayaan, dengan mengkoordinir tindakan, perencanaan strategis dan lain-lain maupun komunikasi yang dihubungkan peranannya dalam mempermudah pengambilan keputusan antara lain fungsinya sebagai pengawasan dan pemberdayaan hak yang dapat memudahkan pimpinan atau organisasi tertentu untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan karena menurut Erliana tujuan komunikasi pada hakekatnya adalah *mencapai pengertian bersama antara komunikator dan komunikan*.

Mudahnya penyampaian pesan dalam semua situasi apapun maupun semua organisasi apapun tentunya terlebih dahulu menyiapkan elemen-elemen penunjang. Seperti pemikiran terhadap proses komunikasi kontemporer yang dikembangkan oleh Claude E Shanon dan Warren Weaver dan juga Wilburr Schramm. Shanon menunjukkan

komunikasi sebagai sistem mekanistik yang berlangsung dalam lima elemen dasar yaitu :

1. *Information source atau senders (komunikator)*
2. *Transmitters (audio, radio, televisi)*
3. *Channel (saluran media)*
4. *Receiver (komunikator yang menerima pesan dari komunikator)*
5. *Destination (tempat atau alamat yang dituju)*

Disamping elemen dasar proses komunikasi yang dikemukakan oleh Shannon, dia juga mengajukan empat komponen sistem yaitu (1) *message/encoding* ; (2) *transmitted* ; (3) *received signal* ; (4) *noise source*.

Disederhanakan oleh Lasswell tentang komponen-komponen yang sistematis yakni "*who says what in which channel to whom*" yang apabila dijabarkan sebagai berikut :

1. *Who*, siapa komunikatornya
2. *Says what*, pesan apa yang dinyatakannya.
3. *In which channel*, media apa yang digunakan.
4. *To whom*, siapa komunikannya.
5. *With what effect*, dampak apa yang dihadapakan.

Karena menurut paradigma Lasswell "*komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu*".

Komunikasi merupakan proses penyampaian ide-ide atau perasaan yang terjaga melalui rasionalitas, objektivitas maupun adanya kejelasan arah. Dalam hal ini arah komunikasi dapat mengalir melalui dua arah yaitu vertikal atau lateral (menyisi).

Vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi kebawah dan keatas.

Kebawah; komunikasi yang mengalir dalam satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi kesuatu tingkat yang lebih bawah (menejer yang berkomunikasi dengan bawahannya. Misalnya dalam bentuk intruksi).

Keatas ; komunikasi yang mengalir ke satu tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi itu. Di gunakan untuk memberikan umpan balik kepada atasan, menginformasikan mengenai pekerjaan.

Lateral : bila komunikasi terjadi diantara anggota kelompok kerja yang sama, pada tingkat yang sama, misalnya komunikasi diantara pimpinan-pimpinan unit kerja tertentu pada level yang sama, atau diantara setiap personil. Komunikasi horizontal atau lateral diperlukan untuk menghemat waktu dan memudahkan koordinasi, komunikasi lateral ini bisa baik dan bisa buruk juga karena dapat menciptakan konflik yang mmengganggu (disfungsional) bila saluran vertikal di terobos.

“Menurut Bride dan Lasswell bahwa komunikasi itu roh dan jiwanya dinamika kehidupan masyarakat “ sehingga berangkat dari pemikiran keduanya pesan merupakan esensial yang harus dikenal (Willbur Schramm). Baik dalam penyampaiannya, media yang harus dipakai dan kebutuhan komunikasi yang harus dipenuhi hal-hal diatas merupakan penunjang terlaksananya komunikasi yang efektif. lebih jelasnya terdapat beberapa tatanan (aturan) komunikasi yang biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan dalam hal ini adalah :

1. Komunikasi primer (komunikasi langsung) atau dalam istilah komunikasi disebut *face to face communication*, dimana terjadi umpan balik secara langsung oleh komunikator dan komunikan tanpa menggunakan media perantara. Dalam hal ini komunikasi seara

langsung lebih efektif digunakan karena komunikator dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan komunikan dan dapat mengetahui apakah komunikan memperhatikan dan memahami apa yang di komunikasikan. Biladikaitkan dengan ilmu pemerintahan, maka kelebihan ini dapat meliputi kemampuan mengajak orang lain bekerja sama yang didalamnya mencakup aktifitas : merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan kemampuan melakukan kontrol/evaluasi. yang termasuk dalam hal ini adalah ceramah,diskusi, seminar,dll.

2. Komunkasi sekunder (komunikasi tidak lanngsung) atau dalam istilah komunikasi disebut mediated communication, proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain (komunikator kepada komunikan) dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang (bahasa) sebagai media pertama. Misalnya menggunakan radio, pers, film, dan televisi. komunikasi ini dipakai apabila arah panenyampaian pesan komunikator kepada penerima pesan (komunikan) di batasi oleh ruang dan waktu dengan jumlah maksimal sehingga salah satu cara untuk menembus ruang dan waktu penyampaian adalah menggunakan media perantara.

Dalam menggunakan media perantara dalam hal ini, surat kabar, radio siaran, televisi siaran, dan filim yang diputar di gedung-gedung bioskop memiliki ciri-ciri tertentu “antara lain ciri massif (massive) atau massal (massal), yakni tertuju tertentu kepada sejumlah orang relatif amat banyak. Sedangkan nirmassa atau media non massa, umpamanya surat, telepon, telegram, poster, spanduk, papan pengumuman, buletin, folder, majalah organisasi, radio amatir, dan film dokumenter, tertuju pada satu orang atau sejumlah orang yang jumlahnya relatif sedikit”.

Metode komunikasi yang di gunakan adalah :

1. *oral transmision*, maksudnya bahwa komunikasi atau penerangan terjadi dengan menggunakan media yang dapat dilihat dan didengar (audio visual) seperti radio, kaset, televisi.
2. *printed materile*, maksudnya komunikasi dengan menggunakan bahan cetak seperti, buletin, majalah, surat kabar, dan buku-buku.
3. *obyektifitas illustration* , yaitu komunikasi yang dilaksanakan dengan menggunakan gambar-gambar atau gerak dan semacamnya yang dapat dilihat. Termasuk didalamnya gambar-gambar, film, televisi pameran dan drama.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa informasi dan komunikasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam menunjang pembangunan bangsa indonesia. Dikarenakan informasi dan komunikasi berdasarkan hakekatnya bahwa informasi merupakan bahan awal yang di kemas penyampaiannya baik dalam bentuk simbol maupun bahasa yang disalurkan melalui aktifitas komunikasi secara timbal balik. Yang bertujuan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan bersama dalam hal ini pembangunan nilai-nilai demokrasi baik pada pemerintah maupun masyarakat sebagai mitra pelaksana pemerintahan.

B. Pengertian Peranan

Peranan berdasarkan konsep adalah sebagai uraian tugas-tugas yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain, yang biasanya terdapat pada sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi, peranan seseorang merupakan kewajiban dalam menjalankan

tugas-tugas yang di embankan oleh pemimpin untuk membantu pelaksanaan fungsi-fungsi kepemimpinannya. Lebih jauh seperti apa yang di kemukakan oleh (Utrecht, 1975 : 20) bahwa *"peranan adalah fungsi yang penting dan fungsi itu adalah tidak lain dari pada pembagian tugas dalam rangkaian organisasi"*. selain itu peran yang dikemukakan dalam cictionary of current english, 1974. sebagai :*"suatu cara khusus yang di berlakukan tentang hubungan antara bagian-bagian tertentu dimana meskipun tidak selamanya berjalan dalam situasi pasti, namun kebanyakan terjadi di selesaikan secara perhitungan-perhitungan rasional"* (Hadi, 1999 : 23).

Berangkat dari pengertian di atas maka secara sederhana kita dapat mengetahui bahwa peranan dalam tinjauan organisasi adalah sebagai bagian-bagian tugas didalam sebuah organisasi yang saling berkaitan dalam pelaksanaan. Yang didalamnya terdapat orang-orang untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Kata peranan sering juga disebut sebagai fungsi dan fungsi tentu berada pada sebuah organisasi. Namun secara umum fungsi dapat di lekatkan pada sebuah organisasi maupun pada seseorang yang berada di komunitas tertentu yang didalamnya terdapat pembagian tugas-tugas berdasarkan jabatan yang di peroleh. Lebih lanjut fungsi atau peranan dalam sebuah organisasi memiliki sifat dinamis seperti apa yang di kemukakan oleh Soekamto dalam bukunya *Penyempurnaan Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional* bahwa *"peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan atas status sesuatu"* (1985 : 237). Untuk melengkapi hal ini konsep peranan sebagai tugas-tugas dalam sebuah organisasi yang di embankan kepada seseorang yang bersifat dinamis maka setidaknya-tidaknya peranan memiliki tiga aspek sesuai dengan pendapat (Rusli, M.K. 1986) menyatakan:

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat di lakukan sebagai organisasi.
3. peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku penting bagi struktur sosial

C. Pengertian Pemerintahan

Kata pemerintahan secara etimologi (asal kata) berasal dari kata “perintah“ yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut

1. Mendapat awalan “Pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam satu negara.
2. Mendapat akhiran “An” menjadi kata “pemerintahan” yang berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuas dan memiliki legitimasi tersebut. (Kencana Syafii, 2001 : 43).

Dalam kata dasar “perintah”, terdapat empat unsur penting yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Ada dua pihak, yaitu pihak yang memerintah di sebut pemerintah dan pihak yang di perintah di sebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
3. Pihak yang di perintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Sebagai pemerintahan yang baik dan bersih dan yang memiliki kekuasaan di harapkan adanya keseimbangan antara pemerintah yang memiliki kewenangan dan masyarakat sebagai pihak yang di perintah dalam setiap pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan karena setiap fungsi-fungsi pemerintahan terdapat hak-hak masyarakat yang harus di penuhi. Pendapat ini lebih jelas di bahas oleh Erliana Hasan dalam bukunya Komunikasi Pemerintahan (2005 : 3) "*..... di bentuk pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktifitas kehidupan secara wajar*". Lebih jauh peranan pemerintah dapat terlihat melalui defenisi pemerintahan yang di kemukakan oleh beberapa pakar. Diantaranya adalah W.S. Sayre, bahwa pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah "*sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan*".

Selanjutnya pendapat Edward Finer "*pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty), dan cara, metode serta sistem (manner, method, dan system) dari pemerintah terhadap rakyat*".

Dari kedua pendapat ini pengertian pemerintahan dapat di lihat melalui kewenangan dan cara, metode maupun sistem pemerintahan. Lebih jauh menurut Sumendar., "*sebagai badan yang penting dalam rangka pemeritahannya, pemerintah mesti memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, komunikasi, dan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi*".

Dan menurut Inu Kencana mendefinisikan pemerintahan adalah "*ilmu yang mempelajari*

bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar". Dari kedua pakar ini, lebih melihat pengertian pemerintahan melalui cara pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam hal ini pelayanan pemerintah kepada rakyatnya sebagai wujud pemerintahan yang baik.

D. Pengertian Akuntabilitas

Kebijakan desentralisasi dan implementasi otonomi daerah pada dasarnya menyangkut pengalihan kewenangan dan sumber daya dari pusat ke daerah-daerah. Daerah dalam pengertian sekurangnya mencakup: (i) institusi-institusi pemerintahan daerah, (ii) elite-elite di daerah, dan (iii) kekuatan-kekuatan sosial politik di daerah. Karena pemerintah pada hakekatnya bersangkutan-paut dengan pengelolaan otoritas publik. Maka di harapkan dengan pengembalian kewenang dan sumber daya ke daerah-daerah penyelenggaraan pemerintah akan lebih efektif dan efisien dalam merespon kepentingan-kepentingan publik di daerah-daerah. Menyangkut dengan pengembalian wewenang dan sumber daya ke daerah, dalam hal ini kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur segala yang menyangkut dengan pemilikan setiap kekayaan rakyat (negara) maka sewajarnya pemerintah untuk bertanggungjawabkannya kepada publik (rakyat). Dengan demikian setiap aparatur pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku, dan kebijakannya kepada publik selama mereka menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang di berikan kepada rakyat.

Menyangkut dengan konsep pertanggungjawaban Darwin dalam Widodo (2001 : 147) mempunyai tiga macam pertanggungjawaban yaitu

"Akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), dan responsivitas (responsiveness)". Sedangkan Hatri (1980) berpendapat bahwa *"Akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang di terapkan untuk mengukur apakah dana publik telah di gunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi di tetapkan dan tidak digunakan secara legal"*.

Candler dan Plano (1982 : 107) mengartikan akuntabilitas sebagai *"Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang CHECKS AND BALANCE dalam sistem administrasi sehingga akuntabilitas berarti menyelenggarakan perhitungan (account) terhadap sumber daya atau kewenangan yang di gunakan"*.

Lebih terperinci di bedakan akuntabilitas dalam lima macam yaitu :

1. *Fiscal accountability*, merupakan tanggungjawab atas dana publik yang digunakan.
2. *Legal accountability* – tanggungjawab atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. *Program accountability*, adalah tanggung-jawab atas pelaksanaan program.
4. *Process accountability*, tanggungjawab atas pelaksana prosedur.
5. *Outcome accountability*, tanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugas.

Ada pun pandangan akuntabilitas yang dijabarkan oleh Jabra dan Dwivedi, (1988 : 59) yaitu sebagai berikut : Akuntabilitas organisasional administratif, akuntabilitas legal, akuntabilitas politik, akuntabilitas profesional dan akuntabilitas moral.

Selanjutnya Finer dalam Widodo (2001 : 148) menjelaskan akuntabilitas merupakan *"konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan*

kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara (birokrasi publik). Akuntabilitas ini yang menilai adalah orang atau institusi yang berada diluar dirinya”.

Dari beberapa pendapat di atas tentang akuntabilitas maka secara umum dapat dikatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atas kewenangan, kinerja yang menyangkut dengan pengelolaan kepemilikan rakyat baik secara institusi, individu (pemimpin suatu organisasi) kepada pihak yang memiliki kewenangan atau hak meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

E. Tujuan dan Fungsi BPPI Wilayah VII Makassar

Pada sebuah organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta tentunya mempunyai tujuan dan fungsi yang jelas. Karena tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang cukup lama sedangkan fungsi adalah rumusan tugas-tugas dalam sebuah organisasi yang di arahkan untuk pencapaian tujuan tersebut. Menyangkut dengan tujuan maupun fungsi sebuah organisasi, Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI) sebagai organisasi pemerintah tentunya mempunyai tujuan yang ingin di capai. Tujuannya adalah : *“Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Peranan atau fungsi balai pengkajian dan pengembangan informasi yang terumuskan melalui keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 84 /KEP/M. KOMINFO/10/2005 tentang organisasi dan tata terkerja balai pengkajian dan

pengembangan informasi, pasal 2 dan pasal 3. yang berbunyi pasal 2 BPPI mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan informasi, pasal 3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, BPPI Wilayah VII Makassar menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program pengkajian dan pengembangan informasi;
- b. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan serta publikasi hasil pengkajian dan pengembangan informasi;
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan informasi di daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi BPPI Wilayah VII Makassar.

Program kerja BPPI Wilayah VII Makassar dimaksud, juga adalah untuk memberikan petunjuk arahan bagi seluruh pejabat Struktural dan fungsional BPPI Makassar dalam rangka melaksanakan kegiatan, tugas dan fungsi BPPI sebagai unit pelaksana teknis di daerah.

Maksud disusunnya, program kerja tahunan BPPI wilayah VII Makassar, sebagai dokumen landasan bagi BPPI wilayah VII Makassar yang secara komprehensif menggambarkan keterkaitan antara tugas dan fungsi, maupun tujuan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan (setahun), sekaligus diharapkan dapat mendukung rencana dan strategi (Program) departemen komunikasi dan informatik, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah No. 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 yang itu semua telah tertuang dalam renstra Badan Litbang SDM tahun 2004-2009.

Secara kelambagaan, tujuannya adalah sebagai dasar bagi BPPI wilayah VII Makassar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara terencana dan dapat dipertanggung jawabkan serta berkesinambungan dalam kurun waktu setahun.

Untuk menjadi pedoman dalam penetapan tujuan dan sasaran BPPI Wilayah VII Makassar secara bertahap dan terencana dalam kurun waktu setahun dan sebagai acuan dalam melakukan pengukuran kinerja BPPI wilayah VII Makassar dalam kurun waktu maupun sebagai bahan acuan pengukuran terhadap Badan Litbang SDM umumnya (Departemen Komunikasi dan Informatika). (Dokumen BPPI Wilayah VII Makassar, 2007).

Dasar-Dasar Penyusunan Program Kerja Tahunan Berjalan

- Keputusan Presiden No. 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara.
- Surat Kputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 84/KEP/M.KOMINFO/10/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPI.
- Rencana Strategis Badan Litbang SDM tahun 2005-2009.
- Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009
- Memo Dinas Sekertaris Badan Litbang SDM Nomor : 491/BLSDMI/KOMINFO/11/2006 tentang Buku Standar Biaya tahunan Anggaran 2007

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Balai Pengkajian Dan Pengembangan Informasi Wilayah

VII Makassar

Balai pengkajian dan pengembangan informasi wilayah VII adalah hasil penyesuaian nomenklatur (tata istilah) dari beberapa yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai nama organisasi. Hal ini berawal dengan nama LPPU Cabang Ujung Pandang dengan atasan langsung pusat penelitian dan pengembangan penerangan (PUSLITBANG) Departemen Penerangan RI, pada tahun 1979 LPPU di rubah menjadi balai penelitian pers dan pendapat umum (BP3U) ujung pandang dengan atasan langsung Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan RI, kemudian pada tahun 1998 departemen penerangan RI di likuidasi namun BP3U tetap melaksanakan tugas dan fungsi di samping menunggu keputusan selanjutnya, penyesuaian ini terus berlanjut tepat pada tahun 2003 berdasarkan SK Kepala Lembaga Informasi Nasional No. 33/SK/KA.LIN/2002 Tgl. 6 juni 2002, maka BP3U ujung pandang resmi di ubah menjadi Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI) Wilaya VII Makassar, dengan wilayah kerja meliputi propinsi Sulsel, Sulteng, Sultra dan Maluku. Namun hal ini berlanjut dengan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 84/Kep/M. KOMINFO/10/2005 tentang organisasi dan tata kerja balai pengkajian dan pengembangan informasi dengan mengingat perubahan peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas Eselon I kementerian negara RI dengan peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2005

bahwa kedudukan, tugas dan fungsi BPPI adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan secara teknis operasional di bina oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi (pengembangan minat baca dan menulis) komunikasi dan informatika dengan wilayah kerja (BPPI Wilayah VII Makassar) meliputi propinsi Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar dan Maluku dengan tugas pokok melaksanakan pengkajian dan pengembangan informasi.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan peraturan presiden No 9 tahun 2005 tentang kedudukan tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja kementerian negara dan peraturan presiden No. 10 tahun 2005 yang telah di ubah dengan peraturan presiden No 15 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas Eselon I kementerian negara RI, status kelembagaan kementerian negara komunikasi dan informasi berubah menjadi departemen komunikasi dan informatika. kemudian, dengan memperhatikan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat No.B / 1962 / M. PAN / 10 / 2005 tanggal 19 oktober 2005 dan keputusan menteri komunikasi dan informatika No.84 / KEP / M. KOMINFO / 10 / 2005 tentang organisasi dan tata kerja balai pengkajian dan pengembangan informasi.

Adapun struktur organisasi tata kerja Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah VII Makassar, sebagai berikut:

1. BPPI di pimpin oleh seorang kepala (Kepala BPPI)

Uraian tugas:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan membimbing serta petunujuk bagi pelaksana tugas bawahan.
- b. Bertanggung jawab kepada atasan yang membawahnya (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).

2. SUB Bagian Umum

Uraian tugas:

Malakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta penyusunan laporan.

3. Seksi Program dan Evaluasi

Uraian tugas

Melakukan penyusunan program pengkajian dan pengembangan informasi di daerah serta evaluasi pelaksanaannya.

4. Seksi Publikasi

Uraian tugas

Melaksanakan publikasi hasil pengkajian dan pengembangan informasi

5. Kelompok Jabatan Fungsional

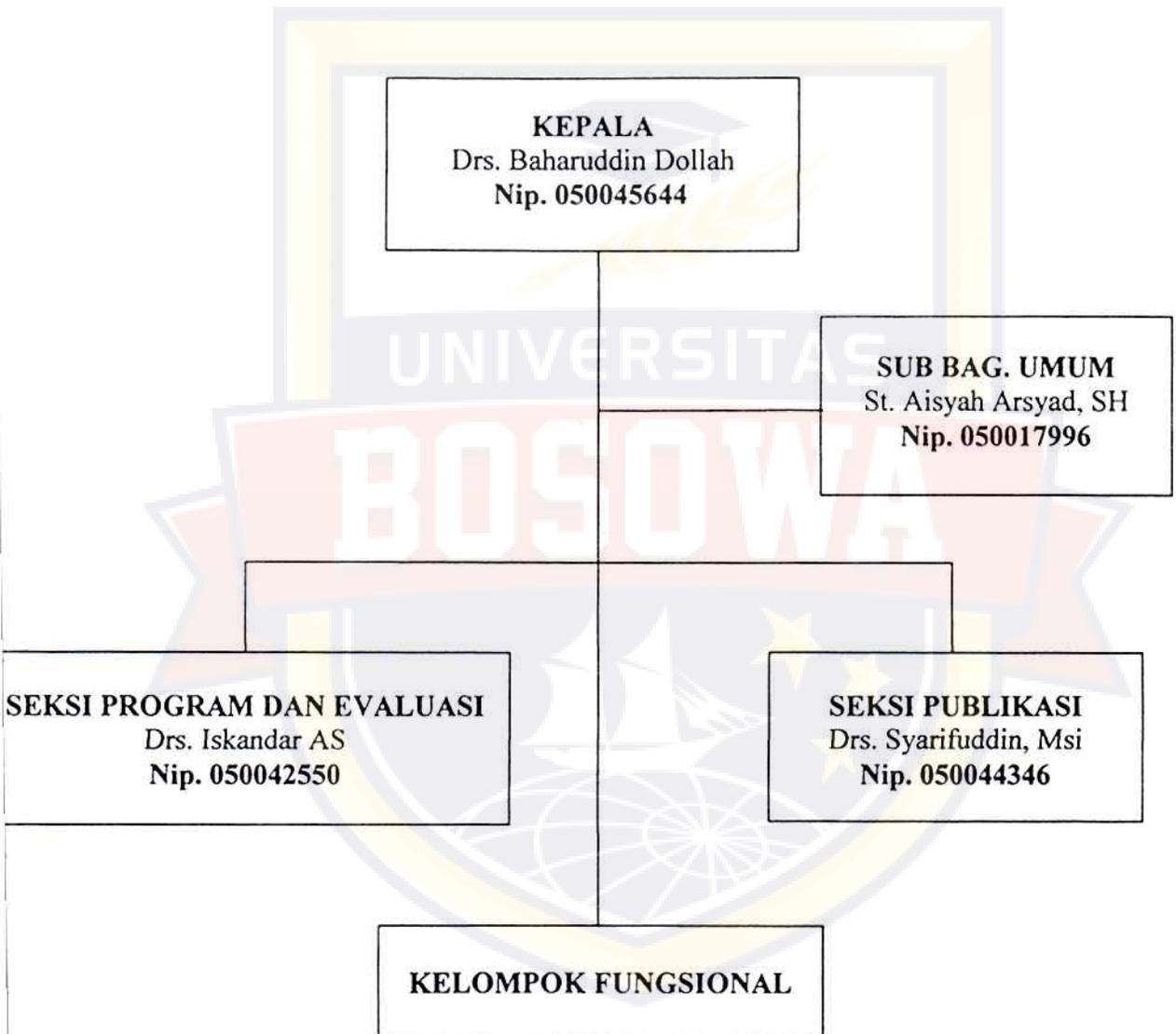
Uraian tugas

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI

DEPARTTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BPPI WILAYAH VII

MAKASSAR



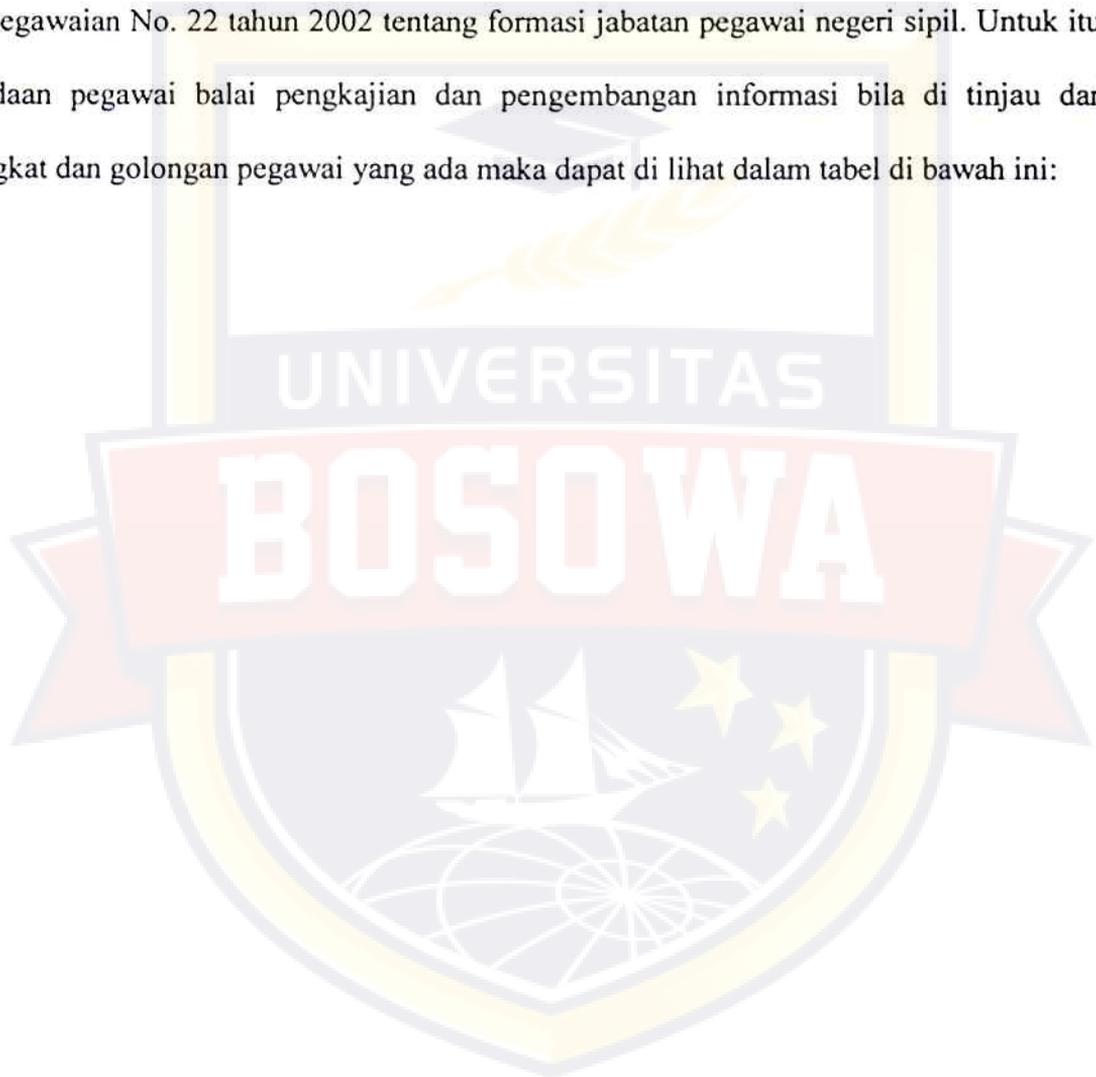
C. Keadaan Pegawai

Pegawai merupakan salah satu perangkat vital dalam lingkungan organisasi yang peranannya meliputi seluruh aktivitas yang menyangkut dan menunjang pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Oleh karena itu sebuah organisasi yang baik tentunya memiliki anggota atau pegawai yang mempunyai kemampuan, untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang telah di berikan. Karena kemampuan pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan memberi motivasi dan lain-lain (Hersey, dalam Joko Widodo, 2001 : 71).

Dalam hal ini berdasarkan tugas pokok dan fungsi Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah VII Makassar, di harapkan mampu dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara terang, jelas dan sederhana sebagai upaya pengembangan di dalam mewujudkan masyarakat budaya informasi. Untuk itu, tentunya di butuhkan pegawai yang mempunyai kemampuan (sebagaimana yang di ungkapkan oleh Hersey, 1994). Pada hal lain dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi di lingkungan (BPPI) balai pengkajian dan pengembangan informasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan untuk mengkoordinasikan pegwainya berdasarkan sistem pemberian wewenang, BPPI sebagai organisasi pemerintahan menggunakan struktur organisasi yang berbentuk (Line Organization) dimana setiap anggota atau pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPPI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan yang di bawahinya :

1. Menurut Pangkat dan Golongan

Dalam sebuah organisasi pemerintahan tentunya di butuhkan wilayah kerja yang jelas dalam hal ini, menyangkut dengan formasi jabatan berdasarkan Undang-Undang Kepegawaian No. 22 tahun 2002 tentang formasi jabatan pegawai negeri sipil. Untuk itu, keadaan pegawai balai pengkajian dan pengembangan informasi bila di tinjau dari pangkat dan golongan pegawai yang ada maka dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:



Tabel. 2

Keadaan Pegawai Balai Pengkajian Dan Pengembangan Informasi Menurut Pangkat atau Golongan

No	Pangkat	Golongan / Ruang	Jumlah	Presentase
1	Pembina utama	IV / e	-	-
2	Pembina utama madya	IV / d	-	-
3	Pembina utama muda	IV / c	-	-
4	Pembina tingkat I	IV / b	-	-
5	Pembina	IV / a	1	3,71
6	Penata tingkat I	III / d	5	18,51
7	Penata	III / c	9	33,34
8	Penata Muda Tingkat I	III / b	3	11,11
9	Penata muda	III / a	5	18,51
10	Pengatur tingkat I	II / d	2	7,40
11	Pengatur	II / c	1	3,71
12	Pengatur muda tingkat I	II / b	1	3,71
13	Pengatur muda	II / a	-	-
14	Juru tingkat I	I / d	-	-
15	Juru	I / c	-	-
16	Juru muda tingkat I	I / b	-	-
17	Juru muda	I / a	-	-
Jumlah			27	100

Sumber data : Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah VII Makassar 2008

Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat bahwa golongan pegawai yang terbanyak pada Balai Pegkajian Dan Pengembangan Informasi (BPPI) wilayah VII makassar adalah golongan III yang terdiri dari 22 orang (81,48 %) dari jumlah pegawai. Kemudian golongan II sebanyak 4 orang (14,81 %) dan golongan IV terdiri dari 1 orang (3,71 %).

2. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berkembang tidaknya sebuah organisasi salah-satunya dapat dilihat dari seberapa banyak dan handalnya organisasi itu memiliki sumberdaya dalam hal ini, sumberdaya manusia. Sumber daya atau kemampuan seorang pegawai sangat penting dan dapat terlihat seberapa pentingnya sumberdaya tersebut pada saat peranan seseorang pegawai terejawantahkan dalam sebuah aktivitas organisasi yang di gelutinya. Karena peranan merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan wilayah kerjanya.

Berdasarkan uraian tersebut, Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi di uraikan sumber daya manusianya dengan mengklasifikasikan pegawai dalam tingkat atau jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan pegawai BPPI dapat di lihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3
Keadaan Pegawai Balai Pengkajian Dan Pengembangan Informasi Wilayah VII
Makassar Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat	Jumlah (orang)	persentase
1	Magister / S ₂	1	3,71
2	Strata Satu / S ₁	20	74,07
3	Diploma	-	-
4	SLTA	5	18,51
5	SMEA	1	3,71
6	SLTP	-	-
7	SD	-	-
Jumlah		27	100

Sumber Data : *Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah VII Makassar, 2008*

Dari sumber diatas, dapat kita ketahui bahwa anggota atau pegawai Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Makassar bila di tinjau dari tingkat pendidikan maka jumlah pegawai lebih banyak berada pada jenjang pendidikan strata satu (S₁) dengan jumlah 20 orang (74,07%), kemudian pegawai yang jenjang pendidikan SLTA berjumlah 5 orang (18,51%). Jenjang pendidikan pasca sarjana 1 orang (3,71%).

3. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Secara keseluruhan pegawai pada Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI) Makassar berjumlah 27 orang yang mana bila di klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat tentunya melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4
Keadaan Pegawai Pada Balai Pengkajian Dan Pengembangan Informasi
Wilayah VII Makassar, Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis kelamin	Jumlah (orang)	Persentase
1	Laki-Laki	17	62,96
2	Perempuan	10	37,04
	Jumlah	27	100

Sumber Data : *Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah VII Makassar, 2008.*

Hasil yang di ketahui berdasarkan angka-angka pada tabel di atas, bila di tinjau berdasarkan jenis kelamin maka, pada balai pengkajian dan pengembangan informasi memiliki pegawai yang lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 17 orang (62,96%). Dan jenis kelamin perempuan berjumlah 10 orang (37, 04) lebih kecil dari jumlah laki-laki pada lingkungan internal BPPI Wilayah VII Makassar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Metodologi BPPI Wilayah VII Makassar Dalam Menjalankan Program Pengkajian dan Pengembangan Informasi.

1. Metodologi Pengkajian BPPI

Sebagai dasar pemikiran terlaksananya otonomi daerah, salah satunya adalah terbukanya kran-kran informasi di tingkat lokal pemerintah kepada rakyat di setiap proses pembangunan. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan pada tingkat daerah secara operasional harus menterjemahkan substansi yang terdapat dalam semangat otonomi daerah di atas dalam suatu visi dan misi pemerintah daerah yaitu menempatkan posisi pemerintah daerah selain sebagai motor penggerak, juga sebagai fasilitator masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, maka pemerintah harus membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk memainkan peran yang lebih besar di setiap proses pembangunan.

Masyarakat didalam proses pembangunan daerah mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menunjang kerja-kerja pemerintahan sebagai bentuk mitra terbaik yang sadar akan tanggung-jawab bersama. Terkait dengan hal ini, masyarakat sangat membutuhkan informasi demi menjaga dan menunjang peran aktif masyarakat dalam memenuhi tuntutan kedaerahan. Selain itu dengan informasi yang didapatkan lewat

kerjasama, dapat memudahkan masyarakat untuk menilai seberapa akuntabelnya kinerja pemerintah pada saat dipertanggung jawabkan nantinya.

Sejalan dengan perkembangan dan pentingnya komunikasi dan informasi sebagaimana yang di amanatkan dalam pasal 28 undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi, mengembangkan secara pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk itu BPPI sebagai salah-satu lembaga yang menyediakan dan menyebarkan informasi publik, serta sebagai fasilitator dalam pelancaran arus informasi antara lembaga pemerintah/negara dengan masyarakat dan media, yang sekaligus melakukan pengkajian dan pengembangan sistem informasi dan penyaluran umpan balik masyarakat, maka pentingnya untuk diketahui bagai mana metodologi pengkajian BPPI sebagai lembaga pengkajian didalam internal pemerintah yang tak lain sebagai subjek dan objek penelitian.

Terkait dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh BPPI dalam melakukan penjangingan informasi maupun pelaksanaan komunikasi dari hasil penelitian maupun pengkajian, maka pentingnya untuk BPPI (tim pengkajian) sebelum melaksanakan aktifitas pengkajian sebagai salah satu fungsi teknisnya, diagendakan dan dirapatkan melalui bagian program dan evaluasi demi memenuhi standar administrasi sebagai bentuk kesatuan kerja internal Lembaga Informasi dan Komunikasi wilayah VII Makassar.

Ada pun rumusan program pengkajian yang di dalamnya terdapat beberapa metodologi yang dipakai sebagai standarisasi keakuratan data dalam melakukan pengkajian lapangan maupun pengkajian melalui media dan beberapa jenis masalah yang dianggap representatif sebagai penyuguhan data penelitian yang telah dikaji oleh BPPI Wilayah VII Makassar sebagai institusi pemerintah Yaitu :

a. Prioritas kegiatan kajian.

1. Pengkajian isu publik.
2. Pengkajian kebijakan pemerintah dibidang KOMINFO.

b. Bentuk kegiatan.

1. Penyusunan instrumen.
2. Pengumpulan data.
3. Pengolahan dan analisis data.
4. Penyusunan laporan kegiatan.

c. Metode pengkajian.

Metode penelitian pengkajian ilmiah yang mencakup pra-kegiatan (persiapan/perencanaan), pelaksanaan kegiatan dan penyebarluasan hasil-hasil kegiatan. Adapun metode yang digunakan bervariasi mengikuti permasalahan yang ingin dikaji dalam hal ini, metode yang pernah digunakan BPPI (tim pengkajian) sebagai instrumen penelitian yaitu :

1. Penelitian survei lapangan (analisis kuantitatif-deskriptif).
2. Metode fokus group/diskusi/dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat, tergantung pada objek, sasaran yang ingin di capai.

3. Metode analisis isi media guna memahami kecenderungan isi serta kerangka (frame) pemberitaan media dalam bidang politik ; metode eksplanatory (explanatory research) untuk mendeskripsikan kredibilitas dan mengetahui faktor-faktor yang turut mempengaruhi kredibilitas media. Selain dari itu, ada beberapa metode kajian isu publik misalnya ; analisis wacana publik (discourse analysis), analisis bingkai (framing analysis), analisis semiotik sosial (semiotic social analysis).
 4. Pementauan umpan-balik ; mengkategorikan umpan-balik masyarakat mengenai kebijakan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan bidang pembangunan Poleksosbud Hankam, Polkamhum, Ekuin dan Kesra.
- d. Penentuan lokasi pengkajian (wilayah BPPI Makassar ; SULSEL, SULTENG, SULTRA, SULBAR, dan MALUKU).
 - e. Jadwal kegiatan pengkajian ...
 - f. Penentuan biaya pelaksanaan kegiatan (Dokumen BPPI Wilayah VII Makassar Tahun, 2003-2008).

2. Metodologi Pengembangan informasi BPPI.

Pembangunan dalam bidang informasi dan komunikasi dewasa ini menjadi salah satu bahan diskusi yang dianggap penting untuk dikembangkan baik didalam dunia pemerintahan, swasta maupun ditingkat masyarakat paling bawah. Dalam kajian administrasi pembangunan dimana informasi dan komunikasi menjadi salah satu bagian penunjang yang tak dapat dilepas pisahkan dalam merumuskan sebuah kebijakan pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini informasi yang telah terumuskan dari setiap

proses pembangunan sebelumnya dapat menjadi bahan penunjang untuk merumuskan kebijakan baru (alternatif-alternatif) sebagai bentuk kelanjutan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Lebih dari itu dengan apa yang telah dirumuskan dan nantinya dijalankan oleh pemerintah, dipublikasikan kepada masyarakat selaku subjek maupun objek dari pembangunan itu sendiri.

Pengembangan informasi yang dilakukan oleh BPPI diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang didera pemerintah kota makassar selaku perumus dan pelaksana dari apa yang telah direncanakan sebagai program kerja dan masyarakat Kota Makassar selaku mitra pemerintah dan objek dari pembangunan tersebut. Program pengembangan sebagai salah satu fungsi operasional BPPI yang menyangkut dengan pengembangan informasi dari hasil-hasil pengkajian sebelumnya, dan dianggap penting untuk dikaji kembali dalam tingkatan forum ilmiah maupun melalui media cetak atau elektronik. Proses pengembangan informasi ini, dinilai perlu guna lebih mensosialisasikan hasil penelitian atau pengkajian BPPI Makassar, dan sekaligus menjadi ajang evaluasi dan arena sumbang saran dalam rangka lebih menyempurnakan hasil-hasil penelitian pengkajian BPPI makassar dan dari hasil tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih bijak dalam menentukan sebuah kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Awal program pengembangan ini dilakukan, sebelumnya dibahas pada tingkat internal BPPI melalui seksi program dan evaluasi, selanjutnya diarahkan ke beberapa seksi dalam hal ini, seksi fungsional (pengkajian) dan selanjutnya dari hasil kerja seksi fungsional di berikan kepada seksi publikasi. Ini tentunya tidak terlepas dengan peranan

dari beberapa seksi BPPI sebagai kesatuan kerja. Dalam proses pengembangan, peran aktif dari seksi publikasi sangat dan amat penting demi menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program tersebut.

Menyangkut dengan program pengembangan BPPI, ada beberapa hal yang perlu diketahui sebagai bahan penyajian dari hasil penelitian dalam hal ini, beberapa bentuk pelaksanaan pengembangan yang dianggap representatif.

a. Monitoring Umpan Balik Kebijakan Publik.

Kebijakan pemerintah pusat, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten maupun kota dianggap berhasil apabila sejalan dengan harapan mayoritas masyarakat. artinya kebijakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Olehnya itu, monitoring umpan balik kebijakan publik perlu dilakukan dan terus dipantau, diamati untuk memahami keinginan atau harapan masyarakat. Tujuan monitoring umpan balik ini, adalah melihat perkembangan isu masyarakat yang berkembang di media massa.

Metode : Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi tentang umpan balik. metode pelaksanaan ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data, mengkategorisasikan jenis umpan balik kebijakan publik dari bidang pembangunan.

Jadwal : Monitoring umpan balik kebijakan publik dilaksanakan mulai bulan januari sampai bulan desember dalam setahun.

Biaya : Kegiatan metode umpan balik BPPI Wilayah VII ini dibiayai dari anggaran operasional BPPI Wilayah VII Makassar yang telah dianggarkan.

b. Pemberdayaan WEB SITE BPPI Makassar.

Pemberdayaan Weeb Site ini dimaksudkan untuk menyediakan data dari informasi tentang berbagai produk BPPI makassar melalui Internet dengan tujuan untuk memberikan pelayanan data dan informasi melalui media internet.

Lokasi : Kegiatan ini dilaksanakan di media senter kantor BPPI wilayah VII makassar.

Metode : Pelaksanaan kegiatan ini yaitu, dengan menyiapkan data dan menyebar luaskan data dan informasi melalui weebsite BPPI Wilayah VII Makassar.

Bentuk Kegiatan :

1. Pengumpulan data dan informasi
2. Pengelolah (editing Layout) data dan nformasi
3. Mengimput data dan informasi hasil pengolahan weebsite

Jadwal : Pemberdayaan weebsite ini dilaksanakan berdasarkan hasil rapat tahunan.

Biaya : Kegiatan ini di biyai melalui kegiatan operasional BPPI Wilayah VII Makassa
Pertahun.

c. Penerbitan.

“Penerbitan Jurnal PEKOMMMAS”

Jurnal pekommmas merupakan salah satu produk BPPI Makassar yang diarahkan untuk mempublikasikan hasil-hasil pengkajian tentang komunikasi, informasi dan media massa, khususnya hasil kajian/penelitian yang dilaksanakan oleh BPPI Makassar.

Lokasi : Kegiatan ini dilaksanakan di makassar (BPPI Makassar)

Metode : Menyiapkan dan menerbitkan artikel ilmiah.

Bentuk kegiatan:

1. Pengumpulan materi penerbitan.
2. Penyunting dan lay out materi penerbitan.
3. Pencetakan dan penggandaan materi penerbitan

Jadwal : Jurnal Pekommmas akan diterbitkan sebanyak yang ditentukan

Biaya : Penerbitan ini dibiayai melalui anggaran operasiaonal BBPI.

d. Seminar Hasil Penelitian dan Pengkajian Wilayah VII Makassar.

BPPI beranggapan bahwa dengan melaksanakan seminar disamping sebagai sarana penyalur informasi dalam bentuk sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah tetapi juga sebagai wadah ilmiah dimana dari hasil penelitian dan pengkajian BPPI dibahas kembali dalam iven tersebut dengan dihadiri pemerintah sebagai penetap kebijakan dan masyarakat sebagai objek kebijakan tersebut yang prosesnya secara sadar terjadi sumbang saran antara keduanya.

Tujuan ini adalah untuk memperoleh gambaran dan evaluasi secara teoritis dan praktis tentang hasil-hasil penelitian dan pengkajian BPPI Makassar. Dengan demikian kedepan BPPI Makassar dapat lebih menyempurnakan kegiatan serta hasil penelitian dan pengkajian.

Lokasi : Kegiatan ini dilaksanakan di makassar

Metode :Kegiatan dirancang sesuai dengan teknik seminar pada umumnya, penyiapan materi, pembicara, dan pembanding serta peserta seminar dari

kalangan instansi dan swasta yang memiliki relevansi dengan hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang akan diseminarkan.

Bentuk Kegiatan:

1. penyusunan rancangan seminar.
2. persiapan pelaksanaan seminar.
3. pelaksanaan seminar.
4. penyusunan laporan hasil seminar

Jadwal : Kegiatan ini dilaksanakan satu hari pada akhir tahun.

Biaya : Dibiayai oleh anggaran operasional BPPI wilayah VII Makassar

(Dokumen BPPI VII Makassar, 2003-2008).

BPPI Wilayah VII Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada tingkat daerah yang berfungsi mengkaji dan mengembangkan hasil kajiannya melalui media cetak maupun elektronik sebagai sarana penyampaian informasi. Berdasarkan data-data yang didapatkan dilapangan tentang fungsi dari BPPI Wilayah VII Makassar, dapat kita menyimpulkan bahwa, BPPI hadir disebuah daerah sebagai instansi analisis yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan yang didera pemerintah daerah. Dari hasil program kerjanya, baik dari pengkajian maupun hasil pengembangan, dapat dijadikan sebuah informasi baru bagi khalayak yang bisa di akses melalui media cetak (PEKOMMMAS) maupun elektronik (WEB SITE) BPPI. Lebih dari itu, dapat menjadi sebuah pemecahan masalah tentang kebijakan public yang diperuntuhkan kepada

pemerintah yang berada pada wilayah kerjanya berdasarkan sinkronisasi hasil pengkajian dan masalah yang sedang didera pemerintah pada wilayah tersebut.

Berdasarkan data penelitian dilapangan menyangkut metode pengkajian maupun pengembangan BPPI Wilayah VII Makassar, kita dapat memahami sistematika proses pelaksanaan program kerjanya. dalam hal ini, BPPI Wilayah VII Makassar sebagai salah satu instansi pemerintah yang dibawah oleh Badan Literasi SDM yang pelaksanaan tugasnya telah terencana sebagai bentuk kesiapan sebuah lembaga. Hal ini biasa dilihat pada bagian penyuguhan hasil penelitian tentang metode pengkajian dan pengembangan informasi. Dimana tergambar bahwa, BPPI sebelum melakukan penelitian atau pengembangan informasi, terlebih dahulu merangkum apa yang menjadi kebutuhan tim sebagai instrument pendukung dalam pelaksanaan penelitian maupun pengembangan informasi nantinya dalam bentuk proposal. Dengan inisiatif ini, orang-orang yang tergabung dalam kesatuan tim peneliti BPPI dapat dengan mudahnya meleksanakan tugas yang di emban sebagai kesatuan kerja BPPI Wilayah VII Makassar. Berdasarkan tugasnya, BPPI melakukan pengkajian dan pengembangan. Dari hasil pengkajiannya dilapangan, dirangkum dan dilaporkan kepada pimpinan fungsional untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dari hasil-hasil informasi, komunikasi dan media massa tersebut yang didapatkan saat meneliti dengan cara diseminarkan atau disebar luaskan melalui media cetak dan elektronik untuk menganalisa kembali hasil-hasil penelitian berdasarkan tanggapan masyarakat yang dilakuak oleh bidang Publikasi. Melalui hasil akhir proses ini, maka lahirlah sebuah pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebuah kebijakan public oleh Instansi Pemerintah Kota Makassar.

Berdasarkan penjabaran diatas yang didapatkan dari hasil dokumentasi pelaksanaan program kerja tahunan BPPI Wilayah VII, maka dapat dikatakan bahwa Metodologi yang dipakai oleh BPPI Wilayah VII Makassar dalam melakukan pengkajian dan pengembangan informasi merupakan metode yang biasanya dipakai oleh para peneliti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak, Drs. Arifuddin selaku Asisten Peneliti Muda Bidang Penerangan/Komunikasi social, sehingga dalam hal ini sangatlah berguna untuk dipergunakan oleh BPPI Wilayah VII Makassar dalam melakukan pengkajian dan pengembangan inforasi. Hal ini pula dapat diperkuat melalui table dibawah ini.

Tabel 5
Tanggapan Responden Tentang Metodologi Pengkajian dan Pengembangan Informasi BPPI Wilayah VII Makassar.

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden Frekuensi	Presentase
1	Sangat baik	1	5,88
2	Cukup baik	9	52,94
3	Kurang baik	6	35,30
4	Tidak baik	1	5,88
	Jumlah	17	100

Sumber data : Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, Tahun 2008

Berdasarkan analisis data diatas, dimana kategori cukup baik dari metodologi yang dipergunakan BPPI Wilayah VII Makassar dengan nilai frekuensi 9 atau 52,94%, kategori sangat baik dengan frekuensi 1 atau 5,88%, sedangkan kategori kurang baik dengan nilai frekuensi 6 atau 35,30%, dan kategori tidak baik dengan frekuensi 1 atau 5,88%, maka dapat kita menarik kesimpulan berdasarkan hasil diatas bahwa, metodologi yang dipergunakan BPPI Wilayah VII Makassar selama ini dapat dikatakan representative dalam melakukan pengkajian maupun pengembangna informasi. Secara teknis metologi yang sering dipakai BPPI Wilayah VII dalam melakukan pengkajian dan pengembangan informasi terbilang baik. Begitu pula secara manfaat dari hasil pengkajian BPPI Wlayah VII Makassar. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket dibawah ini.

Tabel 6

Tanggapan responden Tentang Pemanfaatan hasil Pengkajian BPPI Wilayah VII Untuk Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Kota Makassar.

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden Frekuensi	Presentase
1	Ada	11	64,71
2	Tidak ada	6	35,29
	Jumlah	17	100

Sumber data : Hasil Pengolahan Data Kuisiонер, Tahun 2008

Berdasarkan hasil analisis data penelitian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa metodologi BPPI Wilayah VII Makassar terbilang baik dimana hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat melalui kategori ada dengan frekuensinya 11 atau 64,71%, sedangkan kategori tidak ada frekuensinya 6 atau 35,29%.

B. Keberhasilan BPPI Wilayah VII Makassar Dalam Menjalankan Program Terkait Pertanggung Jawaban Pemerintah Kota Makassar.

Lahirnya paradigma baru pemerintahan telah membawa angin segar didalam sistem pemerintahan Indonesia, dimana pemerintah dituntut agar lebih bijaksana dalam memutuskan sebuah kebijakan, pemerintah juga dituntut agar lebih transparan dalam melakukan fungsi-fungsi pemerintahan dan lebih akuntabel mempertanggungjawabkan segala hal yang dilakukan, terlebih juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyat maupun lembaga-lembaga informasi social dalam hal bekerja sama untuk membantu atau mengawasi di dalam setiap proses pembangunan. Selain itu terlaksananya demokrasi sebagai bentuk system baru didalam tubuh pemerintah telah merubah sifat buruk pemerintah Indonesia yang kerap tertutup dan menjadikan lembaga-lembaga informasi social sebagai lawan atas kekuasaan, kini mulai berubah dan pemerintah mulai berbenah diri bahwa, lembaga-lembaga social yang fungsinya mencari dan menyebar luaskan informasi adalah mitra pemerintah, dan kemitraan ini perlu di jaga demi menumbuh kembangkan nilai-nilai demokrasi.

Dengan lahirnya UU Otonomi Daerah No. 32 maupun 33 tahun 2004, dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membangun dan memajukan daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri, baik pembangunan internal pemerintahan daerah maupun pembanguna social daerah demi mensejahterakan rakyatnya, diharapkan pemerintah daerah mampu menumbuh kembangkan nilai-nilai ideal kemasyarakatan (demokrasi) ditengah-tengah tantangan patologi pemerintahan yang semakin akut menyebar hampir disemua birokrasi pemerintah Indonesia. Pemerintah daerah pula diharapkan mengimplementasikan sebuah pemaknaan baru pemerintahan yang bersih dan bijaksana. Dimana, bersikap adil dalam memberikan peluang kepada rakyat untuk berkompetisi yang tentunya bersifat positif, melahirkan sebuah kebijakan public yang semata-mata menguntungkan rakyatnya, transparan dalam menyusun dan melaporkan hasil program kerjanya, bersih disetiap pelaksanaan tugas maupun akuntabel disetiap proses pertanggungjawaban program kerja kepada rakyatnya. Ini semua demi memulihkan citra pemerintah dimata rakyatnya yang selama ini diketahui dekat dan kerap dengan KKN.

Salah satu wujud terlaksananya pemerintahan yang bijaksana terhadap rakyatnya adalah pemerintah berdasarkan eksistensinya sadar, memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk berkesempatan berperan disetiap proses pembangunan daerah, maupun pemerintah daerah dengan bijaksana memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga lain diluar hirarki ke pemerintahannya dalam hal menjalankan fungsi-fungsi organisasinya, salah satunya lembaga informasi yang berada disekitar wilayah ke pemerintahannya. Ini semua difahami bahwa demokrasi telah membentuk sebuah

efektifitas dari fungsi-fungsi BPPI itu sendiri. Hal ini dapat ditelusuri melalui tabel dibawah ini.

Tabel 9
Tanggapan responden Tentang Keleluasan BPPI dalam melakukan Pengkajian Kembali LPJ Pemerintah Kota Makassar.

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden Frekuensi	Presentase
1	Sangat leluasa	-	-
2	Cukup leluasa	3	17,65
3	Kurang leluasa	10	58,82
4	Tidak leluasa	4	23,53
	Jumlah	17	100

Sumber Data : Hasil Pengolahan Kuisisioner, Tahun 2008

Berdasarkan gambaran table diatas, dimana tingginya jumlah kategori kurang leluasa dengan nilai rata-rata 10 atau 58,82% bila dibandingkan dengan kategori cukup leluasa yang memiliki nilai rata-rata 3 atau 17,65% dan kategori tidak leluasa 4 atau 23,53%. Maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa, keleluasan yang diberikan Pemerintah Kota Makassar kepada BPPI didalam melakukan pengkajian kembali hasil laporan kinerja Pemerintah Kota Makassar sangatlah kurang adanya. Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mencari, mengkaji, menganalisa masalah dan melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai kesimpulan akhir aktifitas pengembangan informasi, dengan hal ini, tentunya sangat berpengaruh pada kinerja BPPI dilapangan. Dimana tim pelaksana fungsional BPPI dalam melakukan pengkajian, mendapatkan hasil

yang tidak maksimal disebabkan atas ketidak efektifan dan efisiensinya pelayanan informasi yang diberikan oleh pemerintah kota Makassar. Pemerintah yang bersikap terbuka sebagai bentuk responsifitas atas eksistensi lembaga lain yang mana, ingin melakukan tinjauan atau pengkajian sebagai bentuk pelaksanaan fungsi keorganisasiannya, maka pemerintah tersebut telah berbenah diri merubah dirinya dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. Karena bentuk keleluasan yang ditunjukkan dari sebuah lembaga pemerintah adalah pemerintah yang memiliki responsifitas tinggi yang bergerak dari luar (berupa hasil saran, masukan tau kritikan masyarakat / lembaga non pemerintah) kedalam (menjadi input untuk pemerintah), sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah bersikap bijak, mau menerima kritikan dari rakyat maupun lembaga lain yang turut berbagi andil didalam pembangunan bangsa dan Negara. Untuk itu, sebagai pemerintah kota yang memiliki kredibilitas yang tinggi, maka tentunya harus meberikan ruang yang cukup bagi BPPI Wilayah VII dalam melaksanakan fungsi yang dalam hal ini adalah pengkajiannya.

Tabel 10
Tanggapan Responden Tentang Efektifitas Pelaksanaan Fungsi BPPI Wilayah VII
dalam Proses Pertanggung Jawaban Pemerintah Kota Makassar

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden Frekuensi	presentase
1	Sangat efektif	-	-
2	Cukup efektif	4	23,53
3	Kurang efektif	11	64,71
4	Tidak efektif	2	11,76
	Jumlah	17	100

Sumber Data : Hasil Pengolahan Kuisisioner, Tahun 2008

Dari hasil analisis diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan kurangnya keleluasan ruang yang diberikan pemerintah kepada BPPI dalam melakukan pengkajian maka konsekuensi logis yang harus diterima BPPI atas kerja yang kurang efektif adalah terhambat berjalannya proses penjangkaran informasi dan ketidak akuratnya data yang diperoleh dari penelitian atau pengkajian dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah kategori kurang efektifnya pelaksanaan fungsi BPPI dengan frekuensi 11 atau 64,71%, sedangkan kategori cukup efektif memiliki frekuensi 4 atau 23,53% dan kategori tidak efektif dengan frekuensi 2 atau 11,76%.

Dalam penyajian informasi yang dilakukan pemerintah kota Makassar, selain dibutuhkan keleluasan dalam mendapatkan informasi, tentunya pula diharapkan sikap demokratisasi dan transparansi disela-sela pelaksanaan fungsi pengkajian BPPI Wilayah

VII sebagai bentuk pencitraan pemerintah Kota Makassar yang baik dan bersih. Menyangkut dengan hal ini, tentunya pula tuntutan sikap demokratis dan transparansi pemerintah bukan hanya diberikan atau diaplikasikan kepada BPPI Wilayah VII selaku lembaga informasi namun lebih dari itu, hak untuk mendapatkan informasi tentunya dimiliki oleh semua orang, semua lembaga maupun semua masyarakat Kota Makassar. Maka tentunya, pemerintah kota makassar dalam melakukan penyampaian informasi harus bersikap terbuka dan berlaku adil bagi siapapun dan untuk lembaga manapun yang ada di kota makassar. Karena dengan sikap demokratis dan transparansinya pemerintah daerah, lembaga-lembaga non pemerintah/pemerintah daerah (BPPI) yang melibatkan diri didalam pembangunan daerah dengan mudah mengumpulkan, meyebarkan dan melakukan pengembangan dari informasi-informasi tentang perkembangan kinerja pemerintah yang tentunya diperuntukan untuk masyarakat kota makassar. Hal ini dapat dilihat melalui table dibawah ini. Lebih dari itu untuk menghindari aparat pemerintah yang bertindak semenah-menah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang tentunya demi kemaslahatan masyarakat kota Makassar. Sehingga perlu adanya pemerintah bersikap demokratis dan transparan didalam melaporkan hasil kinerjanya. Ini semua berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance.

Tabel 11
Tanggapan Responden Tentang Demokratisasi dan Transparansi Pemerintah Kota Makassar Dalam Proses Penyusunan (LPJ) Pemerintah Kota Makassar.

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden Frekuensi	Presentase
1	Sangat demokratis dan transparan	-	-
2	Cukup demokratis dan transparan	3	17,65
3	Kurang demokratis dan transparan	9	52,94
4	Tidak demokratis dan transparan	5	29,41
	Jumlah	17	100

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, Tahun 2008

Dari penjelasan diatas, dimana seharusnya pemerintah bersikap demokratis dan transparan disetiap proses pelaksanaan program kerjanya dengan memandang BPPI sebagai organisasi yang berfungsi membantu pemerintah dalam hal mengkaji dan menyampaikan hasil kajian ulang (LPJ) Pemerintah Kota kepada masyarakat Kota Makassar demi memudahkan Pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan rencana kerja maupun hasil kinerjanya kepada rakyat yang dipimpinnya. Namun ternyata, berdasarkan data hasil penelitian bahwa yang terjadi, Pemerintah Kota Makassar kurang memberikan keleluasan kepada BPPI Wilayah VII untuk melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya sehingga mencapai hasil yang maksimal. Hal ini sangat terlihat jelas dari hasil analisis table diatas. Dimana kategori pemerintah kurang demokratis dan transparan sangat tinggi nilai rata-ratanya dengan frekuensi 9 atau 52,94% dan kategori cukup

demokratis dan transparan dengan nilai rata-rata 3 atau 17,65%, maupun kategori tidak demokratis dan transparan sebanyak 5 atau 29,41%.

Untuk membangun sebuah pemerintahan yang baik dan bersih, tentunya membutuhkan sebuah keseriusan dari aparaturnya pemerintah serta dukungan dari berbagai pihak yang salah-satunya adalah masyarakat. Dari sisilain hal ini sangat penting adanya dukungan dari pihak-pihak tertentu untuk bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satunya adalah peranan BPPI sebagai lembaga informasi. Menyangkut dengan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Kota Makassar disetiap proses pembangunan kota Makassar, tentunya peran aktif BPPI wilayah VII Makassar sangat dibutuhkan sebagai lembaga non pemerintah daerah kota Makassar. Dengan kata lain, keterlibatan BPPI sebagai lembaga informasi disela-sela pembangunan kota Makassar, dalam hal membantu pemerintah mensosialisasikan apa yang ingin dilakukan atau yang dikerjakan oleh pemerintah baik dalam proses perencanaan program kerja, evaluasi kinerja pemerintah maupun pelaksanaan pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat Kota Makassar sebagai wujud pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawah. Untuk menyimpulkan seberapa penting keterlibatan BPPI didalam proses pelaksanaan program kerja Pemerintah Kota Makassar, kita dapat melihat table dibawah ini.

Tabel 12
Tanggapan Responden Tentang Keterlibatan BPPI Wilayah VII dalam
Penyusunan Perencanaan Program Kerja Pemerintah Kota Makassar.

No	Kategori penilaian	Tanggapan Responden Frekuensi	Presentase
1	Melibatkan	3	17,65
2	Tidak melibatkan	14	82,35
	Jumlah	17	100

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, Tahun 2008

Berdasarkan analisis data diatas, dimana kategori tidak melibatkan sangatlah tinggi dengan nilai frekuensi 14 atau 82,35%, dan bila dibandingkan dengan kategori pemerintah kota melibatkan BPPI didalam penyusunan perencanaan program yang mempunyai nilai rata-rata dengan frekuensi 3 atau 17,65%. Hal ini dapat kita menyimpulkan bahwa eksistensi BPPI dikota Makassar, bagi pemerintah kota, sangat lah tidak berpengaruh atau tidak mempunyai nilai peran yang begitu berarti untuk bersama-sama dengan pemerintah kota dalam membangun daerah kota makassar. Didalam penyusunan perencanaan program kerja pemerintah, tentunya diharapkan tak terlepas-pisahkan dari apa yang diharapkan masyarakat. Dengan kata lain, ketika program pemerintah kota terangkum, sudah termagtub aspirasi masyarakat kota Makassar dari berbagai golongan. Sehingga hal ini dikatakan bahwa kebijakan pemerintah Kota makassar tidak meninggalkan nilai-nilai kemasyarakatan atau kebijakan pemerintah kota mulai berpihak kepada rakyatnya. Untuk mengetahui apa yang diinginkan masyarakat

kota makassar, dengan kompleksitas fungsi pemerintahan daerah, maka pemerintah kota makassar tentulah membutuhkan mitra terbaik dari lembaga-lembaga diluar lingkup pemerintah kota tersebut, yang salah satunya adalah BPPI Wilayah VII sebagai lembaga informasi di Kota Makassar. BPPI Wilayah VII, secara fungsional sesungguhnya memiliki nilai positif didalam membantu pemerintah untuk melakukan penjangkaran aspirasi pada tingkat masyarakat kota Makassar. Dengan fungsi pengembangan BPPI Wilayah VII, pemerintah kota dapat memperkaya referensi dalam hal memahami keinginan masyarakat kota Makassar yang nantinya akan dirumuskan menjadi sebuah kebijakan daerah. Dari hal tersebut, kita dapat mamahami bahwa keterlibatan lembaga informasi dalam hal membantu pemerintah daerah untuk lebih mengenal dan memahami apa yang diinginkan masyarakat, amat dan sangatlah penting. Demi menjaga dan menumbuh-kembangkan pencitraan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyatnya.

Tabel 13
Tanggapan Responden Tentang Keterlibatan BPPI Wilayah VII dalam Proses
Evaluasi Program Kerja Pemerintah Kota Makassar.

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden Frekuensi	Presentase
1	Ya	5	29,41
2	Tidak	12	70,59
	Jumlah	17	100

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, Tahun 2008

Tingginya kategori (tidak) dilibatkan BPPI Wilayah VII oleh pemerintah kota dengan melihat nilai frekuensinya diatas 12 atau 70,59%, sedangkan kategori (ya) dengan nilai frekuensi 5 atau 29,41%, maka disimpulkan bahwa, dalam setiap proses evaluasi yang dilakukan didalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, BPPI Wilayah VII tidak pernah dilibatkan. Berdasarkan hasil analisis table (tentang keterlibatan BPPI dalam penyusunan program kerja dan proses evaluasi pemerintah kota) diatas, kita dapat mamahami bahwa selama ini peranan BPPI dikota Makassar yang menyangkut dengan pertanggungjawaban pemerintah kota Makassar, sungguh tak dapat dilihat. Ini disebabkan atas tidak dilibatnya BPPI Wilayah VII oleh Pemerinta Kota didalam proses-proses penting tersebut. Pemerintah tidak seharusnya memandang bahwa dilibatkannya lembaga-lembaga informasi didalam pelaksanaan akuntabilitas, ketika diselenggarakannya pertanggung jawaban pemerinta pada akhir periode kepemimpinan seseorang atau pun dilibatkan saat-saat laporan akhir pelaksanaan program kerja tahunan pemerintah. Namun lebih dari itu, baik didalam penyusunan laporan program kerja pemerintah maupun evaluasi program kerja, pemerintah seharusnya melibatkan mereka selaku lembaga informasi. Menyangkut dengan hal tersebut, untuk mewujudkan Good Gavernance pada pemerintah kota Makassar, tentunya keterlibatannya lembaga-lembaga informasi, bukan hanya diperbolehkan ketika ada hubungan hirarki yang jelas dengan pemerintah. dalam hal ini, pemerintah kota Makassar. Namun seharusnya perintah bersikap terbuka untuk lembaga informasi manapun yang mau bekerja sama dalam menyebar-luaskan informasi. Demikian pula, Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan pertanggung jawaban

kinerjanya, tidak pernah BPPI dilibatkan secara institusional. Hal ini, dapat kita lihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 14
Tanggapan Responden Tentang Keterlibatan BPPI Wilayah VII Secara Institusional Dalam Hal Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Makassar.

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden Frekuensi	Presentase
1	Di libatkan	-	-
2	Tidak dilibatkan	17	100
	jumlah	17	100

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, Tahun 2008

Berdasarkan gambaran tabel diatas, dimana kategori tidak dilibatkan menjadi pilihan dari semua sampel, maka dapat disimpulkan dari beberapa penjabaran table sebelumnya bahwa, dari beberapa proses penting yang harus dilakukan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini, proses perencanaan program kerja, proses evaluasi kinerja Pemerintah Kota, maupun dalam proses pertanggung jawaban Pemerintah Kota Makassar dimana hal yang dianggap urgens dalam pembenahan pemerintah menuju pemerintah yang baik, bersih dan bijaksana, sangat lah jauh dari apa yang diharapkan. Dimana sesungguhnya pemerintah harus bersikap adil, transparan dan demokratis dalam setiap pelaksanaan program kerja pemerintah.

Disetiap proses penting pelaksanaan pemerintahan kota yang menyangkut dengan pengolahan sumberdaya-sumberdaya daerah yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, tentunya membutuhkan sebuah penenganan dari berbagai pihak dalam rangka bersama-sama mengawal jalannya proses pengolahan berbagai sumberdaya yang ada dikota Makassar. Hal ini bisa dilihat dari kompleksitas peran pemerintah dalam mengolah sumberdaya tersebut. Sehingga keberadaan BPPI Wilayah VII dianggap penting sebagai salah satu organ pemerintah yang berada di Kota Makassar untuk bersama-sama mengamankan pos-pos sumber daya daerah yang mempunyai nilai kemasyarakatan. Pengawasan ini bisa dilakukan bersama-sama oleh berbagai pihak bila saja bangunan hubungan diantara lembaga satu dengan yang lain terjalin dengan baik. Menyangkut dengan keharmonisasian hubungan, hubungan antara pemerintah dalam hal ini Instansi INFOKOM KotaMakassar dengan BPPI Wilayah VII Makassar dapat kita lihat melalui tabel dibawah ini.

Table 15
Tanggapan Responden Tentang Hubungan BPPI Wilayah VII dengan Instansi
INFOKOM Kota Makassar.

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden Frekuensi	Presentase
1	Sangat baik	-	-
2	Cukup baik	1	5,88
3	Kurang baik	9	52,94
4	Tidak baik	7	41,18
	Jumlah	17	100

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, Tahun 2008

Berdasarkan analisis data diatas, dimana jumlah kategori kurang baik begitu tinggi dengan frekuensi 9 atau 52,94%, sedangkan kategori cukup baik nilai frekuensinya 1 atau 5,88% dan kategori tidak baik nilai frekuensinya 7 atau 41,18%. Maka disimpulkan bahwa dari kedua lembaga tersebut yang nota benen mempunyai kemiripan didalam pelaksanaan fungsi-fungsi keorganisasian, sehingga dianggap dapat dengan mudah terbangun jalin kerja sama yang baik, malah menampakkan kurangnya terbangun hubungan keharmonisan.

BPPI Wilayah VII dan Instansi INFOKOM Kota Makassar selaku lembaga informasi yang berada dikota Makassar, seharusnya terjalin hubungan kemitraan yang baik disetiap proses pembangunan informasi pada wilayah Kota Makassar. Hal ini demi

memudahkan masyarakat untuk mengkonsumsi semua perkembangan informasi diseperti pengembangan lingkup pemerintah kota Makassar. Efek dari ketidak terbangunnya jalinan kemitraan antara lembaga-lembaga atau instansi yang berada pada lingkup pemerintah kota dengan BPPI Wilayah VII, maupun ketidak luasannya ruang gerak yang diberikan pemerintah kepada BPPI dalam melakukan pengkajian maupun pengembangan informasi didalam setiap proses pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah adalah melemahnya tingkat partisipasi dari keduanya didalam proses pembangunan daerah kota Makassar. INFOKOM Kota Makassar Lebih Memfokuskan Pengembangan informasinya kedalam (lingkungan pemerintah kota) dan kurangnya melakukan monitoring perkembangan reaksi masyarakat atas kebijakan pemerintah kota dilingkungan masyarakat dimana kebijakan itu dilaksanakan. Sedangkan BPPI wilayah VII, mulai mengurang tingkat partisipasinya didalam proses pengembangan daerah Kota Makassar dan lebih memfokuskan program kerja pada wilayah diluar daerah Kota Makassar. Hubungan ketidak harmonisan keduanya (BPPI wilayah VII dan INFOKOM) sudah berlangsung lama. Hal ini dapat dicermati melalui hasil wawancara dengan Bapak, **Ir, Abd. Samad, M. M**, selaku Kepala Bidang Pengembangan Informasi INFOKOM..” yang terjadi selama ini, hubungan yang terbangun antar BPPI Wilayah VII dan INFOKOM tidak begitu baik selaku lembaga informasi. Hubungan dari keduanya terjalin dalam bentuk penyampaian baik melalui telpon atau utusan orang-orang BPPI ketika ada program kerja yang diberikan kedaerah semacam sosialisasi peraturan pemerintah, hasil refisi Undang-Undang atau seminar nasional yang diberikan dari pusat” (hasil wawancara, jumat, 29-01-2008).

Menyangkut dengan kompleksitas hubungan dari kedua lembaga tersebut, serta kurangnya tingkat efektifan pelaksanaan fungsi-fungsi BPPI Wilayah VII di lingkungan Pemerintah Kota, maka tentulah berdampak pada nilai partisipasi BPPI ditengah-tengah pembangunan kota Makassar. Hal ini dapat terlihat melalui table dibawah ini.

Tabel 16

Tanggapan Responden Tentang Tingkat Partisipasi BPPI Wilayah VII dalam Proses Pembangunan Kota Makassar.

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden Frekuensi	Presentase
1	Sangat baik	2	11,76
2	Cukup baik	3	17,65
3	Kurang baik	7	41,18
4	Tidak baik	5	29,41
	Jumlahn	17	100

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, Tahun 2008

Berdasarkan hasil analisis diatas, dimana kategori kurang baik begitu tinggi jumlahnya dengan frekuensi 7 atau 41,18%, sementara kategori sangat baik lebih kecil dengan nilai frekuensi 2 atau 11,76%. kategori cukup baik nilai frekuensinya 3 atau 17,65% dan kategori tidak baik nilai frekuensinya 5 atau 29,41%. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa tingkat partisipasi BPPI didalam pembangunan kota Makassar kurang baik atau tidak representative sebagai lembaga pemerintah.

Dari gambaran masalah sebelumnya baik tentang hubungan kemitraan maupun secara professional lembaga adalah melaksanakan fungsi lembaga dengan sebaik-baiknya dalam hal ini, pelaksanaan fungsi BPPI Wilayah VII berdasarkan SK MENKOWINFO No. 84/KEP/M. KOMINFO/10/2005, yang itu mengisahkan sedemikian kompleksitas eksistensi BPPI Wilayah VII, maka tentulah sangat berpengaruh pada kinerja BPPI Wilayah VII Makassar untuk mencapai sebuah target pengembangan informasi. Hal ini dapat ditelusuri pula melalui hasil penelitian dibawah ini.

Table 17
Tanggapan Responden Tentang Tingkat Keberhasilan BPPI Wilayah VII Makassar Dalam Melaksanakan Fungsinya.

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden Frekuensi	Presentase
1	Sangat berhasil	-	-
2	Cukup berhasil	4	23,53
3	Kurang berhasil	8	47,06
4	Tidak berhasil	5	29,41
	Jumlah	17	100

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Kuisicner, Tahun 2008

Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata kategori kurang berhasil 8 atau 47,06%, sedangkan cukup berhasil nilai frekuensinya 4 atau 23,53% dan kategori kurang berhasil frekuensinya 5 atau 29,41%, maka dapat disimpulkan bahwa ruang yang diberikan Pemerintah Kota Makassar kepada BPPI Wilayah VII dalam melaksanakan fungsi dasarnya dalam hal ini, melakukan pengkajian dan pengembangan informasi, kurangnya transparansi dalam memberikan informasi, dan ketidak harmonisasinya hubungan antar lembaga informasi pemerintah dan BPPI wilayah VII maupun melemahnya tingkat partisipasi BPPI dalam proses pembangunan daerah kota Makassar maka berdampak negative pada kinerja BPPI itu sendiri yang konsekuensi logis dari pelaksanaan kerja yang tidak maksimal adalah kurang berhasilnya pencapaian target didalam proses pelaksanaan program kerja tersebut. Dari penjabaran diatas, dapat kita memahami bahwa dengan kendala maupun hambatan yang didera BPPI Wilayah VII disetiap proses pelaksanaan fungsi pada lingkup pemerintah kota, maka sungguh sangat tidak representative peranan BPPI Wilayah VII didalam pembangunan daerah kota Makassar. Dari segi pelayanan informasi kepada khalayak kota Makassar yang menyangkut dengan perkembangan informasi disepuluh wilayah pemerintah kota makassar, sangatlah nihil adanya. Baik tentang informasi rencana kerja pemerintah, evaluasi kinerja pemerintah maupun tentang pertanggung jawaban pemerintah kota Makassar. Hal ini, tentunya memperkecil ruang gerak masyarakat kota dalam hal melakukan control disetiap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Lemahnya fungsi control masyarakat baik yang tergabung dalam sebuah lembaga (LSM) maupun secara personality dan kurangnya partisipasi masyarakat didalam

mengawal pengembangan daerah, sehingga bisa saja dapat mengakibatkan pembangunan daerah berjalan pincang. Hal ini disebabkan atas muatan kebijakan pemerintah yang tak pernah berpihak kepada rakyat. Ini di perparah dengan sikap tertutupnya pemerintah, dengan kata lain pemerintah tidak transparan dan akuntabel disetiap pertanggung jawaban kinerja pemerintah.

Tabel 18
Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Hal Pembangunan Kota Makassar.

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden Frekuensi	Presentase
1	Sangat baik	-	-
2	Cukup baik	5	29,41
3	Kurang baik	8	47,06
4	Tidak baik	4	23,53
	Jumlah	17	100

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, Tahun 2008

Dari data diatas, kita dapat melihat bahwa kurangnya partisipasi masyarakat didalam pembangunan daerah kota Makassar. Dengan nilai rata-rata kategori kurang baik, 8 atau 47,06%, sedangkan kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 5 atau 29,41%, dan kategori tidak baik dengan nilai rata-rata, 4 atau 23,53%. Kurangnya partisipasi masyarakat Kota Makassar didalam proses pembangunan daerah, tentunya berkurang

pula pengawasan masyarakat kota didalam proses pembangunan tersebut. Ini merupakan rantai masalah yang butuh penyikapan serius dari berbagai pihak yang sadar akan eksistensinya berda pada daerah pembangunan tersebut. Aturan main didalam Undang-Undang otonomi daerah No. 32 dan 33 tahun 2004 telah memberikan ruang yang cukup bagi rakyat untuk menggunakan hak kerakyatanya melibatkan diri disetiap proses pembangunan daerah. Untuk itu, penting adanya keterlibatan masyarakat baik secara langsung atau secara tidak langsung, maupun keterliban masyarakat secara lembaga social atau secara individu untuk bersama-sama mengawal arah pembangunan daerah tersebut. Menyangkut dengan keleluasan peran masyarakat dalam melibatkan diri disetiap proses pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2004 maka masyarakat kota Makassar berhak dan perlu meningkatkan intensitas keterlibatannya dan juga lebih proaktif didalam mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah baik dalam bentuk pembangunan fisik maupn non fisik. Dari pada itu, dengan terbentuknya kesadaran bahwa pambangunan daerah kota makassar adalah tanggung jawab bersama dalam mengarahkan jalur pembangunan tersebut, baik pemerinta kota makassar, masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah/pemerintah daerah. Tentunya pula dibutuhkan kesadaran kolektif dari pemerintah selaku lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan otonomi daerah, agar kiranya lebih bersikap terbuka dan menerima peran maupun saran dari masyarakatnya.

Tabel 19
Tanggapan Responden Tentang Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Kota Makassar dalam Menyusun dan Melaporkan Hasil Kinerjanya.

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden	Presentase
		Frekuensi	
1	Sangat baik	-	-
2	Cukup baik	2	11,76
3	Kurang baik	13	76,47
4	Tidak baik	2	11,76
	Jumlah	17	100

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Kuisioner

Berdasarkan tabel diatas, dimana kategori kurang baik dengan jumlah 13,76%, kategori cukup baik 2 atau 11,76%, dan kategori tidak baik dengan nilai frekuensinya 2 atau 11,76%, maka dapat disimpulkan bahwa, kurangnya tingkat akuntabilitas pemerintah kota kepada masyarakat kota Makassar. Terwujudnya Good Governance pada pemerintah daerah Kota Makassar, salah-satunya adalah terselenggaranya akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah kota kepada masyarakat kota Makassar dengan semaksimal mungkin. Ini semua menyangkut dengan pengelolaan sumber-sumber dana daerah yang berasal dari rakyat, sehingga butuh penangan dari aparatur yang kredibilitasnya dapat dipercaya. Lebih dari itu, untuk mengembangkan penerapan nilai-nilai demokratisasi pada tingkat lokal, sehingga perlu adanya pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah atas kinerjanya. Tuntutan akuntabilitas pemerintah, sudah menjadi harga mati didalam pelaksanaan pemerintahan diindonesia. Terlebih lagi

didalam pelekasanaan pemerintahan daerah, berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance.

Begitu pula dengan lemahnya atau kurang baiknya tingkat pengawasan yang dilakukan masyarakat kota didalam proses pembangunan daerah kota Makassar. Ini dapat dilihat melalui table dibawah ini

Table 20
Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pengawasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Makassar.

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden	Presentase
		Frekuensi	
1	Sangat baik	-	-
2	Cukup baik	4	23,53
3	Kurang baik	8	47,06
4	Tidak baik	5	29,41
	Jumlah	17	100

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, Tahun 2008

Dari hasil analisis data diatas, yang menjelaskan bahwa tingginya nilai kategori kurang baik dengan frekuensinya 8 atau 47,06%, sedangkan nilai kategori cukup baik frekuensinya 4 atau 23,53%, dan nilai kategori tidak baik dengan frekuensi 5 atau 29,41%. Maka dapat disimpulkan bahwa begitu rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan masyarakat ditengah-tengah ketidak akuntabelnya pemerintah maupun sikap tertutupnya pemerintah terhadap rakyat. Hal ini bias berakibat fatal didalam

pembangunan daerah. dimana pemerintah daerah dengan kewenangannya sepihak mengarahkan jalur pembangunan berdasarkan inisiatif pemerintah sendiri tanpa mengamati dimanakah letak kebutuhan atau kemauan masyarakat untuk dilakukan pemerintah selaku lembaga yang mempunyai otoritas.

Berdasarkan pembahasan hasil-hasil analisis diatas, dapat kita melihat tidak begitu representativnya peranan Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah VII didalam pembangunan daerah kota Makassar yang dalam hal ini, terkait dengan akuntabilitas Pemerintah Kota Makassar. Tentunya disebabkan atas peleksanaan fungsi yang tidak maksimal dari BPPI Wilayah VII. Ini pun diperparah dengan menurunnya tingkat partisipasi BPPI Wilayah VII dikarenakan kurangnya ruang yang diberikan BPPI oleh Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan penjangingan informasi didalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, kurangnya sikap demokratis dan transparansi pemerintah disela-sela pelaksanaan fungsi pengkajian BPPI Wilayah VII yang mengakibatkan hasil pengkajiannya tidak representative. BPPI Wilayah VII sebagai lembaga informasi pun tidak pernah dilibatkan kala pemerintah mengadakan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dianggap penting dalam hal ini, proses akuntabilitas Pemerintah kota dikarenakan nilai peran yang dimainkan BPPI dianggap tidak begitu khusus disebabkan atas adanya lembaga informasi yang memiliki keterkaitan hubungan hirarki dengan pemerintah kota Makassar (INFOKOM) yang dianggap representative dalam menyampaikan informasi kepada khalayak kota Makassar yang tentunya informasi tersebut dianggap penting untuk disampaikan, maka BPPI dianggap takperlu untruk dilibatkan.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Dihadapi BPPI Wilayah VII Makassar.

Didalam proses pembangunan dewasa ini, sebagai lembaga pemerintah maupun sebagai lembaga sub-pemeintah, dituntut agar lebih aktif di setiap peranannya demi memajukan daerah dimana lembaga tersebut berada. Tuntutan seperti ini sudah menjadi harga mati sebagai lembaga pemerintah yang sadar akan eksistensinya, bahwa kewenangan yang dimilikinya merupakan amanah yang diberikan oleh rakyat untuk melindungi, memberdayakan maupun melayani masyarakat yang dipimpinya.

BPPI sebagai lembaga informasi yang tersebar dibeberapa provinsi dan salah satunya adalah Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah VII yang berkedudukan di Kota Makassar, yang berdasarkan SK Menkominfo No. 84/KEP/M. KOMINFO/10/2005 adalah bagian pemerintah pada tingkat daerah. berdasarkan SK diatas pula, bahwa BPPI memiliki kesatuan kerja dengan lembaga Pengembangan SDM, dimana BPPI berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lembaga tersebut. Berdasarkan penjabaran diatas, dimana BPPI Wilayah VII sebagai bagian pemerintah yang sadar akan tanggung jawabnya, berupaya seoptimal mungkin melaksanakan fungsi-fungsi keorganisasiannya baik didalam proses pengkajian maupun pengembangan informasi demi berupaya menumbuh kembangkan budaya informasi diwilayah Kota Makassar.

BPPI secara eksistensi dapat dilihat sama seperti lembaga-lembaga non pemerintah lainnya yang mana di sela-sela proses pelaksanaan fungsi lembaga sering diperhadapkan dengan barbagai macam persoalan. persoalan internal lembaga dalam hal ini, lemahnya sumberdaya manusia yang dimiliki, baik secara kuantitas maupun secara

kualitas, ketidak memadainya instrumen organisasi, yang salah satunya adalah Teknologi Informasi (IT) dan juga ketidak kondusifnya lingkungan organisasi yang tentunya dapat menghambat berjalannya fungsi-fungsi administrasi lembaga tersebut. Sedangkan bila ditinjau dari segi eksternal lembaga, persoalan tersebut salah satunya dapat dilihat dari keharmonisan hubungan lembaga diluar lingkup kesatuan kerja maupun masyarakat yang berda disekitar lembaga dimana organisasi itu berada. Hal ini sudah menjadi kisah klasik didalam dunia organisasi dewasa ini. Untuk itu, BPPI sebagai salah satu organisasi yang eksis didaerah Kota Makassar untuk mengkaji dan menyebar luaskan informasi kepada masyarakat tentunya akan mengalami hal yang sama. Dimana dipertemukan dengan persoalan internal lembaga maupun eksternal lembaga yang berdampak pada efektifitas maupun efisiensi pelayanan informasi BPPI itu sendiri.

1. Faktor Pendukung.

Untuk memudahkan berjalannya roda organisasi sebuah lembaga, tentunya dibutuhkan prasaran pendukung sebagai pelengkap sistem keorganisasiannya. Menyangkut dengan instrument pendukung sebuah organisasi, tentunya BPPI sebagai lembaga informasi dapat dilihat apa-apa saja yang ada dan jadi pendorong didalam menunjang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi keorganisasiannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala pimpinan BPPI Wilayah VII Makassar, **Bapak, Drs. Baharuddin Dolla** (14-01-2008), bahwa selama ini yang menjadi faktor dasar adanya kemudahan yang dialami pegawai BPPI Wilayah VII dalam melaksanakan tugasnya adalah BPPI Wilayah VII Makassar memiliki kemudahan didalam melakukan kordinasi

pada jajaran pegawainya dari berbagai bidang karena lembaga tersebut memiliki jumlah pegawai yang terbilang sedikit. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Drs. Iskandar AS** (18-01-2008). Selaku Kepala Seksi Program dan Evaluasi, bahwa “BPPI Wilayah VII Makassar didalam melaksanakan fungsinya, ditunjang dengan IT (teknologi informasi) yang rata-rata dari setiap bidang memiliki 3 unit computer dan 2 unit mesine tik. Didalam mengembangkan atau menyebarkan hasil pengkajian atau pengembangn informasi, BPPI Wilayah VII, telah memanfaatkan sistem pengembangn informasi. Yang didukung dengan IT (4 unit komputer) yang difungsikan sebagai media center BPPI yang dinamakan dengan galeri Internet”. BPPI Wilayah VII Makassar memiliki pegawai yang loyalitasnya tinggi terhadap amanah yang diemban. BPPI Wilayah VII Makassar memiliki, iklim organisasi yang kondusif sehingga dengan keakraban maupun kenyamanan, pegawai BPPI Makassar dapat dengan mudah menyelesaikan tugas-tugas berdasarkan bagian-bagian yang terdapat didalam tubuh organisasi BPPI Makassar tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Ibu **St. Aisyah Arsyad, SH**, selaku Kepala Sub. Bagian Umum (25-01-2008).

2. Faktor Penghambat.

Disamping kemudahan yang dialami BPPI Wilayah VII Makassar didalam menjalankan roda keorganisasiannya dikarenakan BPPI Makassar memiliki prasarana yang memadai, namun secara universal, tentu pula didalam melaksanakan fungsi-fungsi keorganisasiannya BPPI Wilayah VII akan mengalami dengan namanya hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang dialami BPPI Wilayah VII Makassar dalam

melakukan pengkajian maupun pengembangan informasi adalah Cakupan Wilayah kerja BPPI Wilayah VII Makassar yang terbilang rumit, disebabkan atas terdapatnya beberapa propinsi sebagai kesatuan wilayah kerja dalam hal ini ; Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Sulawesi Tengah dan Propinsi Maluku.

Dengan luasnya cakupan wilayah kerja BPPI Wilayah VII Makassar berdasarkan tinjauan SK MENKOMINFO No. 84/KEP/M. KOMINFO/10/2005, dan juga terpisahnya lautan dan daratan dari beberapa propinsi, dalam hal ini propinsi Maluku, maka sangat menghambat jalur dan jangkauan pelaksanaan fungsi kajian dari BPPI Wilayah VII sehingga tidak semuanya BPPI Wilayah VII dapat mengkanfer permasalahan yang dianggap kompleks dan urjen untuk diteliti atau dikaji pada semua daerah yang masuk padah wilayah kerjanya. Selain itu, Secara kuantitas BPPI Wilayah VII Makassar Memiliki Sumberdaya manusia yang dianggap minim. Bila disinerjiskan dengan cakupan wilayah kerja BPPI Wilayah VII berdasarkan SK Menti KOMINFO No. 84/KEP/M. KOMINFO/10/2005. Hal ini dapat dilihat melalui table dibawah ini.

Table 21
Tanggapan Responden Tentang Keseimbangan Antara SDM yang Dimiliki BPPI Wilayah VII Makassar Dengan Luas Wilayah Kerjanya.

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden Frekuensi	Presentase
1	Sangat seimbang	-	-
2	Cukup seimbang	1	5,88
3	Kurang seimbang	10	58,82
	Jumlah	17	100

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, Tahun 2008

Berdasarkan hasil data diatas, dimana kategori Kurang seimbang lebih tinggi nilai frekuensinya yang dalam hal ini, 10 atau 58,82%, sedangkan kategori cukup baik 1 atau 5,88%, dan kategori tidak baik nilai frekuensinya 6 atau 35,30%, maka dapat kita simpulkan bahwa SDM yang dimiliki BPPI Wilayah VII Makassar yang dalam hal ini berjumlah 27 tidak mampu mengimbangi luas wilayah kerjanya.

Table 22
Wilayah Kerja Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah VII
Makassar, Berdasarkan SK No. 84/ KEP/M. KOMINFO/10/2005

Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi	Makassar	Propinsi : <ul style="list-style-type: none"> • Sulawesi Selatan • Sulawesi Tenggara • Sulawesi Tengah • Maluku

Sumber Data : Dokumen BPPI Wilayah VII Makassar, Tahun 2008

Berdasarkan data dokumentasi BPPI Wilayah VII Makassar tentang luas wilayah kerjanya diatas, maka kita dapat pastikan bahwa dengan minimnya SDM yang dimilikinya akan berakibat tidak meratanya pelaksanaan fungsi BPPI Wilayah VII pada daerah-daerah yang terbilang jauh (Mis. Maluku).

Anggaran Operasional BPPI Wilayah VII Makassar yang didapatkan dari pusat sangat terbatas, sehingga program BPPI Wilayah VII Makassar tidak semuanya dapat dilaksanakan. Hal ini pun sangat berpengaruh bagi BPPI Wilayah VII didalam merumuskan program lanjutan sebagai bentuk kesinambungan sistem kerja pada tingkat daerah yang berda diluar Makassar. Menyangkut dengan memadainya anggaran operasional sebagai penunjang pelaksanaan fungsi BPPI Wilayah VII maka dapat kita lihat melalui table dibawah ini.

Table 23
Tanggapan Responden Tentang Memadainya Anggaran Operasional BPPI
Wilayah VII Makassar.

No	Kategori Penilaian	Tanggapan Responden	Presentase
		Frekuensi	
1	Sangat memadai	-	-
2	Cukup memadai	2	11,76
3	Kurang memadai	12	70,59
4	Tidak memadai	3	17,65
	jumlah	17	100

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Kuisisioner, Tahun 2008

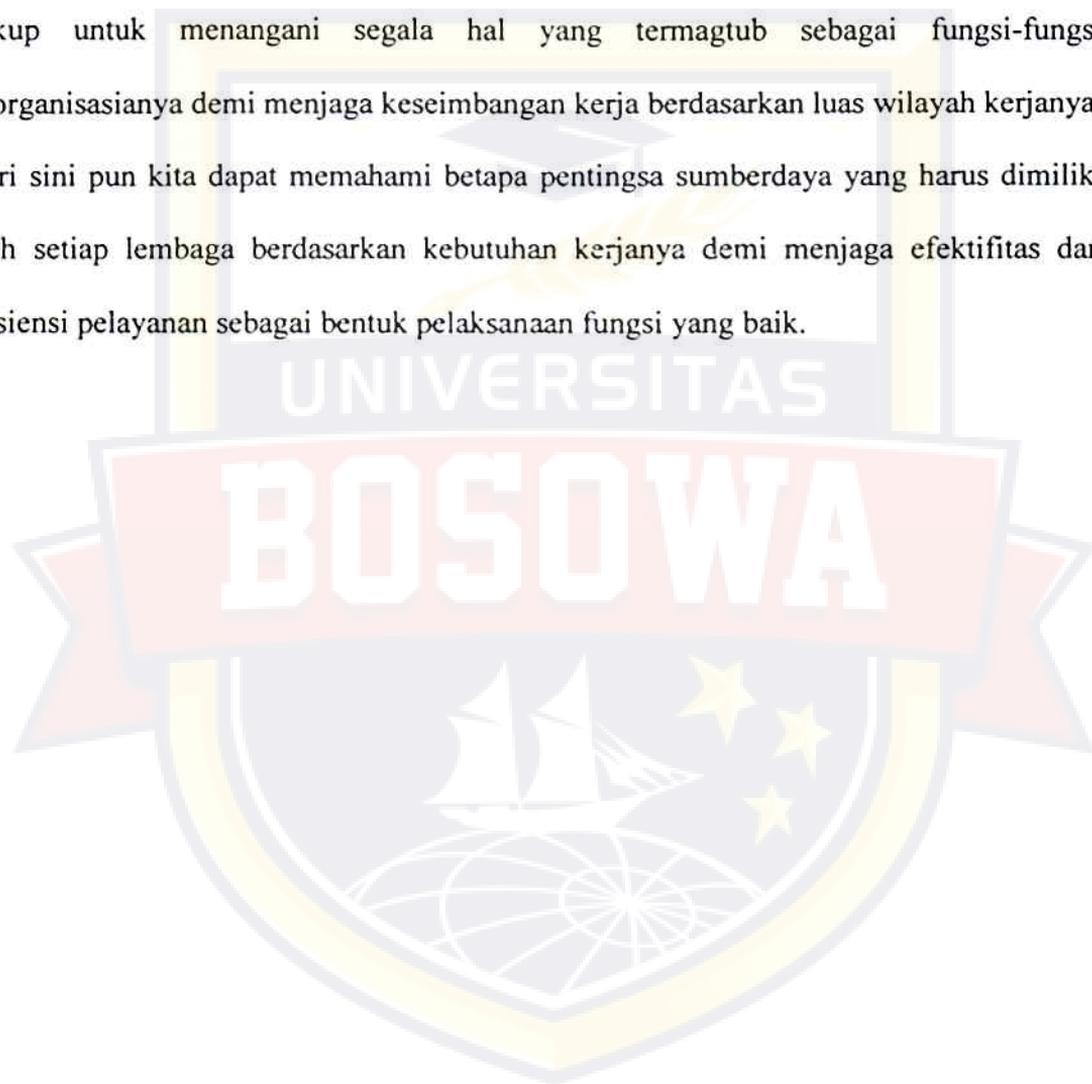
Berdasarkan hasil analisis data diatas, dimana kategori kurang memadai sangatlah tinggi dengan nilai frekuensi 12 atau 70,59%, sedangkan kategori cukup memadai dengan nilai frekuensinya 2 atau 11,76% yang terbilang kecil, maupun kategori tidak memadai yang mempunyai nilai frekuensi 3 atau 17,65%, maka dapat kita simpulkan bahwa BPPI Wilayah VII Makassar dalam melaksanakan program kerjanya terbentur dengan minimnya dana operasional yang telah teranggarkan.

BPPI Wilayah VII Makassar dalam setahun memiliki beberapa program kerja yang terbilang banyak dilaksanakan diluar daerah kota Makassar sehingga hal ini dapat membagi-bagi fokus kerja BPPI pada tingkat kota. Ini yang menjasi kendala tem BPPI

dalam menentukan fokus kerja. Hal ini pula diperparah dengan keterbatasan sumberdaya manusia yang bergelut pada bidang fungsional (pengkajian BPPI).

Berdasarkan penjabaran di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan banyaknya permasalahan yang didera BPPI Wilayah VII Makassar didalam menjaga performa perputaran roda keorganisasiannya, baik terbentur dengan jangkauan wilayah kerja yang begitu luas, keterbatasan sumberdaya manusia yang tak mampu mengimbangi luasnya wilayah kerja BPPI Wilayah VII maupun dibenturkan dengan focus kerja dari berbagai program kerja BPPI Wilayah VII Makassar yang terbilang tumpang tindih dan semua pun lebih banyak diorientasikan pada luar daerah Kota Makassar dan juga keterbatasan dana operasional yang dikucurkan dari pusat, Sehingga dalam pelaksanaan tugas dari bidang fungsional BPPI Wilayah VII yang dalam hal ini melakukan pengkajian yang berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah kota Makassar terbilang tidak efektif atau tidak representative. selain itu, didalam penyebaran informasi kepada khalayak yang tersebar di beberapa propinsi baik dalam bentuk jurnal maupun majalah tidak maksimal tersebar diseluruh khalayak yang dianggap BPPI Wilayah VII berhak mendapatkannya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala BPPI Wilayah VII Makassar, Bapak Drs. Baharuddin Dolla (14-09-2007). Disela-sela wawancara, beliau mengatakan bahawa “Dengan keterbatasan dana yang didapatkan dari pusat, maka pegawai BPPI Wilayah VII dalam menyebarkan hasil pengkajiannya hanya dikhususkan oleh beberapa instansi dalam rens waktu pelaksanaan tugas dan hasil pengkajian hanya diberikan kepada lembaga atau instansi

yang menjasi objek kajian BPPI Wilayah VII saja”. Berdasarkan penyampaian kepala BPPI Wilayah VII Makassar, kita dapat menyadari bahwa Lembaga Pengkajian dan Pengembangna Informasi Wilayah VII Makassar sangat memerlukan sumberdaya yang cukup untuk menangani segala hal yang termagtub sebagai fungsi-fungsi keorganisasiannya demi menjaga keseimbangan kerja berdasarkan luas wilayah kerjanya. Dari sini pun kita dapat memahami betapa pentingnya sumberdaya yang harus dimiliki oleh setiap lembaga berdasarkan kebutuhan kerjanya demi menjaga efektifitas dan efisiensi pelayanan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi yang baik.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat kita lihat tentang kondisi ril yang terjadi pada BPPI Wilayah VII Makassar yang tentunya menyangkut dengan akuntabilitas Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan rumusan masalah, kesimpulan ini akan dijabarkan dalam tiga bagian. Bagian pertama akan menyimpulkan tentang metodologi pengkajian dan pengembangan, yang kedua, akan menyimpulkan tentang keberhasilan BPPI Wilayah VII dalam menjalankan program kerja, dan yang ketiga adalah membahas tentang faktor pendukung dan penghambat BPPI Wilayah VII dalam menjalankan tugasnya.

1. Kesimpulan tentang metodologi

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian tentang metodologi BPPI Wilayah VII Makassar, kita dapat melihat bahwa kesiapan-kesiapan tem BPPI dalam melakukan pengkajian maupun pengembangan informasi terbilang baik, dimana sebelum melakukan pengkajian, BPPI terlebih dahulu merencanakan, merapatkan hasil rencana dan dari hasil rapat tersebut dijadikan program kerja. Selain itu, metodologi yang dipergunakan dalam melakukan pengkajian dan pengembangan informasi BPPI Wilayah VII Makassar sangatlah representative dimana metodologi tersebut sering juga dipergunakan oleh berbagai penelitian, baik lembaga penelitian maupun personal peneliti.

2. Keberhasilan BPPI Wilayah VII dalam menjalankan program kerjanya.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian kita dapat melihat begitu tidak maksimalnya peranan BPPI Wilayah VII Makassar dalam hal pertanggungjawaban Pemerintah Kota Makassar, dikarenakan lemahnya ruang yang diberikan pemerintah kota kepada BPPI Wilayah VII dalam melakukan pengkajian maupun, kurang dan bahkan tidak adanya keterlibatan secara lembaga dari BPPI Wilayah VII didalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang menyangkut dengan pertanggung jawaban pemerintah kota, maupun kurangnya sikap demokratis dan transparansi pemerintah disela-sela pelaksanaan fungsi pengkajian, sehingga hasil pengkajian BPPI Wilayah VII pun tidak maksimal. Hal ini pun diperparah dengan hubungan BPPI Wilayah VII dan instansi INFOKOM Kota Makassar yang tidak efektif sebagai lembaga atau instansi informasi. Secara internal lembaga yang menyangkut dengan pembangunan kota, BPPI Wilayah VII pun tidak begitu terlihat peranannya. Dikarenakan atas melemahnya keterlibatan BPPI Wilayah VII didalam pembangunan dan ketidak representatifnya hasil pengkajian maupun pengembangna informasi bila difokuskan pada pertanggung jawaban Pemerintah Kota Makassar.

3. Factor pendukung dan penghambat.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya tentang factor pendukung dan penghambat BPPI Wilayah VII, kita dapat melihat bahwa lembaga informasi ini secara internal lembaga, mengalami kekurangan sumberdaya manusia (SDM), dan anggaran operasional bila dikaitkan dengan luas wilayah kerja berdasarkan SK No. 84/KEP/M.KOMINFO/10/2005.

B. SARAN

1. BPPI Wilayah VII Makassar harus melakukan pembenahan didalam internal lembaga yang dalam hal ini, adalah penambahan sumberdaya manusia demi mengimbangi luasnya wilayah kerja BPPI Wilayah VII Makassar.
2. BPPI Wilayah VII Makassar pula harus lebih meningkatkan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga informasi lainnya khususnya pada wilayah kota Makassar. Hal ini, agar lebih dikenal secara eksistensi oleh lembaga-lembaga informasi kota makassar lainnya.
3. Menyangkut dengan luasnya wilayah kerja BPPI Wilayah VII Makassar yang terbilang rumit sebagai lembaga Sub-Pemerintah, yang dalam melaksanakan fungsinya dibentur dengan minimnya alokasi anggaran yang diterima BPPI Wilayah VII maupun kurangnya penyebaran hasil pengkajian maka tentunya BPPI Wilayah VII perlu adanya penambahan anggaran operasional lembaga.
4. BPPI Wilayah VII Makassar agar lebih berupaya untuk mensosialisasikan eksistensinya dengan cara menyebar luaskan hasil pengkajian dan pengembangan informasi. Dan yang lebih terpenting adalah informasi yang telah dirangkum menjadi jurnal, majalah dll, agar penyebarannya lebih tersentuh pada masyarakat.
5. BPPI Wilayah VII Makassar harus melakukan pembenahan hubungan kemitraan dengan lembaga atau instansi pemerintahan yang ada dikota Makassar. Ini semua untuk mempermudah BPPI Wilayah VII nantinya pada saat melakukan pengkajian didalam lingkup pemerintahan yang ada dikota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- B. N. Marbun, 2005, *Otonomi Daerah 1945-2005*, Proses dan Realita, Jakarta: Pusta Sinar Harapan
- Davis B. Gordon, 1999, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian I*, Jakarta Pusat : PT Pustaka Binaman Pressindo.
- D. Ph. Agung, Nugraha, I Gusti, 2004, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi ; Kiat-kiat Untuk Mempersingkat Waktu Penulisan Karya Ilmiah Yang Bermutu*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Erliana, Hasan, 2005, *Komunikasi Pemerintahan*, Bandung : PT Refika Aditama
- E. Utrecht, 1975, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Ikhtiar
- Hoeta Soehoet, 2003, *Filsafat Komunikasi*, Jakarta : Yayasan Kampus Tercinta.
- Hadi waluyo, 1999, *Peranan Sumber Daya Manusia dalam Usaha Meningkatkan Produktifitas Kerja, Kasus-kasus Menagemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Badan Penerbit IPWI.
- Inu Kencana, Syafiie, 2001, *Filsafat Pemerintahan*, Jakarta : PT Perca
- Joko Widodo, 2001, *Good Governance, Telaah dari dimensi ; Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Surabaya : Insan Cendekia.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998
- Samsuddin Haris, 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah ; Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Jakarta : LIPI Press, Anggota IKAPI
- Soekanto, Sarjono, 1985, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : ALFABETA.

DOKUMEN

Keputusan Kepala Lembaga Informasi Nasional Nomor 33/SK/KA. LIN/2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 84/KEP/M. KOMINFO/10/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi.



ANGKET PENELITIAN

unjuk Pengisian

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan objektif
2. Untuk soal pilihan ganda, lingkarlah salah satu jawaban yang menurut anda dianggap benar.
3. Untuk pertanyaan essay, jawablah di bagian bawah pertanyaan berdasarkan kondisi objektif.

Identitas Responden

a :
mat :
an :

UNIVERSITAS

ROSO WA

1. Apakah instrumen yang berkaitan dengan eksistensi BPPI, yaitu SK MENKOINFO No. 84/KEP/M. KOMINFO/10/2005 dianggap sudah cukup kuat?

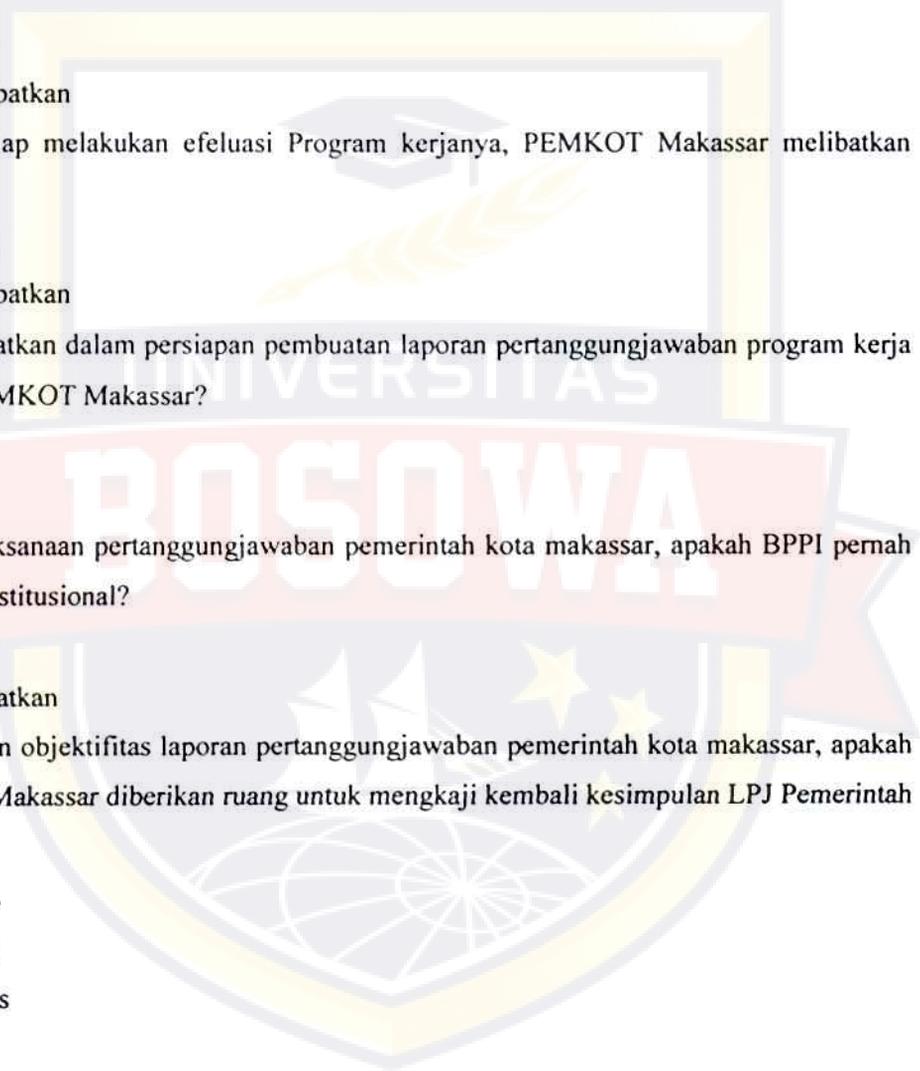
- a. Sangat kuat
- b. Cukup kuat
- c. Kurang kuat
- d. Tidak kuat

Apakah instrumen hukum yaitu SK MENKOINFO No. 84/KEP/M. KOMINFO/10/2005, berkaitan dengan peran, dan tugas BPPI dianggap memadai?

- a. Sangat memadai
- b. Cukup memadai
- c. Kurang memadai
- d. Tidak memadai

Bagaimanakah respon masyarakat tentang keberadaan BPPI di Kota Makassar?

- a. Sangat baik
- b. Cukup baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

4. Bagaimanakah respon pemerintah daerah Kota Makassar tentang keberadaan BPPI?
 - a. Sangat baik
 - b. Cukup baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 5. Apakah dalam setiap penyusunan perencanaan program kerjanya, PEMKOT Makassar melibatkan BPPI?
 - a. Melibatkan
 - b. Tidak melibatkan
 6. Apakah dalam setiap melakukan evaluasi Program kerjanya, PEMKOT Makassar melibatkan BPPI?
 - a. Melibatkan
 - b. Tidak melibatkan
 7. Apakah BPPI dilibatkan dalam persiapan pembuatan laporan pertanggungjawaban program kerja yang dilakukan PEMKOT Makassar?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 8. Dalam proses pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah kota makassar, apakah BPPI pernah dilibatkan secara institusional?
 - a. Di libatkan
 - b. Tidak dilibatkan
 9. Menyangkut dengan objektivitas laporan pertanggungjawaban pemerintah kota makassar, apakah BPPI wilayah VII Makassar diberikan ruang untuk mengkaji kembali kesimpulan LPJ Pemerintah Kota Makassar?
 - a. Sangat luas
 - b. Cukup luas
 - c. Kurang luas
 - d. Tidak luas
- 

10. Bagaimana efektifitas pengkajian maupun pengembangan BPPI dalam proses pertanggungjawaban pemerintah kota makassar?
- Sangat efektif
 - Cukup efektif
 - Kurang efektif
 - Tidak efektif
11. Bagaimana tingkat demokratisasi dan transparansi Pemerintah Kota Makassar dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Makassar.
- Sangat demokratis dan transparan
 - Cukup demokratis dan transparan
 - Kurang demokratis dan transparan
 - Tidak demokratis dan transparan
12. Bagaimana tingkat keberhasilan BPPI Wilayah VII Makassar dalam melaksanakan program pengkajian maupun pengembangan diwilah kerjanya?
- Sangat berhasil
 - Cukup berhasil
 - Kurang berhasil
 - Tidak berhasil!
13. Bagaimana tingkat akuntabilitas Pemerintah Kota Makassar berdasarkan kinerjanya?
- Sangat baik
 - Cukup baik
 - Kurang baik
 - Tidak baik
14. Bagaimana pengawasan masyarakat terhadap pembangunan kota makassar?
- Sangat baik
 - Cukup baik
 - Kurang baik
 - Tidak baik
15. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan kota makassar?
- Sangat baik
 - Cukup baik
 - Kurang baik
 - Tidak baik

16. Dengan lembaga apa saja, BPPI bekerja sama dalam hal pengkajian maupun pengembangan informasi?

- a.
- b.
- c.
- d.

17. Menyangkut dengan fungsi BPPI, masalah Pemerintah Kota Makassar apa sajakah yang telah dikaji oleh BPPI wilayah VII Makassar?

- a.
- b.
- c.
- d.

18. Bagaimana keseriusan lembaga-lembaga pengkajian lainya yang ada di Kota Makassar dalam menyikapi hasil laporan pemerintah yang menyangkut dengan pembangunan Kota Makassar?

- a. Sangat serius
- b. Cukup serius
- c. Kurang serius
- d. Tidak serius

19. Sejauh mana keberhasilan lembaga-lembaga pengkajian yang ada di Kota Makassar dalam melaksanakan fungsinya, terkait dengan pembangunan Kota Makassar?

- a. Sangat berhasil
- b. Cukup berhasil
- c. Kurang berhasil
- d. Tidak berhasil

20. Bagaimana hubungan BPPI Wilayah VII Makassar dengan instansi INFOKOM sebagai lembaga pengembangan informasi Kota Makassar?

- a. Sangat baik
- b. Cukup baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

21. Sejauh mana partisipasi BPPI Wilayah VII Makassar dalam proses pembangunan daerah (Kota Makassar)?

- a. Sangat baik
- b. Cukup baik
- c. Kurang baik
- d. Tidak baik

22. Dalam proses pelaksanaan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Makassar, apakah masyarakat dilibatkan secara individu atau lembaga (LSM)?

- a. Di libatkan
- b. Tidak dilibatkan

23. Kepada Instansi Kota apa sajakah BPPI Wilayah VII Makassar pernah melakukan pengkajian?

- a.
- b.
- c.
- d.

24. Adakah lembaga lain menggunakan hasil kajian BPPI untuk mengevaluasi kinerja PEMKOT Makassar?

- a. Ada
- b. Tidak ada

25. Lembaga apa saja yang menggunakan hasil kajian BPPI dalam mengevaluasi kinerja PEMKOT Makassar?

- a.
- b.
- c.
- d.